

**EVALUASI PROGRAM PERIKANAN TERHADAP
PENINGKATAN NILAI PRODUKSI IKAN ASIN TERI DI
KOTA LHOKSEUMAWE
(Studi Kasus Di Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan
Pangan Kota Lhokseumawe)**

Sufi

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Email: *sufi @unimal.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Evaluasi Program Perikanan Terhadap Peningkatan Nilai Produksi Ikan Asin (Teri) Di Kota Lhokseumawe. Program peningkatan nilai produksi perikanan dibuat agar produksi ikan asin teri yang ada di Pusong Baru Kota Lhokseumawe dapat meningkat produktifitasnya dari tahun ke tahun. Dalam mengimplementasikan Program tersebut DKP3 masih terkendala dengan minimnya anggaran untuk di salurkan kepada Masyarakat Nelayan yang ada di Pusong Baru. Sehingga mengakibatkan nilai produksi pengeringan ikan asin yang ada di Pusong menurun tingkat produksinya dari tahun 2016 hingga 2017, hal ini dikarenakan minimnya bantuan yang di salurkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe untuk para nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan kendala dalam evaluasi program perikanan untuk meningkatkan nilai produksi ikan asin teri di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program DKP3 untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang ada di Pusong Baru diterima dengan baik oleh masyarakat nelayan dan pedagang disana. Namun dalam pelaksanaan program tersebut DKP3 kekurangan anggaran untuk disalurkan kepada para nelayan, sehingga terjadilah ketidaksinambungan antara nelayan dan DKP3 dalam produksi perikanan. Program tersebut terkendala juga dengan susahnyanya meminta data hasil tangkapan ikan segar kepada para nelayan, sehingga DKP3 Kota Lhokseumawe enggan untuk turun langsung kelokasi untuk meminta data kepada para nelayan. Dikarenakan hal tersebutlah kurangnya upaya dari dinas untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang ada di Kota Lhokseumawe

Kata Kunci: Evaluasi, Anggaran, Peningkatan Produksi, Teri, Nelayan

A. PENDAHULUAN

Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Dalam sistem kehidupan masyarakat pantai sangat dipengaruhi oleh daerah pesisir. Berbicara tentang pesisir tentu saja tidak jauh dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat melaut. Lingkungan sosial masyarakat pesisir pada umumnya mengembangkan kehidupan sosial yang lebih efektif dan efisien, dengan demikian kehidupan sosial di daerah tertentu mempunyai peran lembaga pemerintah untuk meningkatkan nilai produksi perikanan tangkap yang siap diolah dan dikirim ke daerah lainnya agar produktifitas ikan dan pemasokan ekonomi bagi masyarakat pun dapat meningkat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1), Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Berkenaan dengan Masyarakat Pesisir telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 pasal 1 ayat (4), sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya, sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut

yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 pasal 1 ayat (15 dan 39), pengelolaan perikanan secara bersama adalah pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Kota, nelayan, Panglima laot dan pemangku kepentingan lainnya secara bersama untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal, lestari dan berkelanjutan. Dan pengelolaan ikan adalah kegiatan menyimpan, mendinginkan, menangani, dan/atau mengawetkannya. Dalam qanun ini telah dinyatakan secara jelas bahwa segala yang berkaitan dengan kelautan yang ada di daerah Aceh bisa dikelola dan dimanfaatkan bersama sesuai dengan qanun tersebut.

Produksi ikan asin asal Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, mampu menembus pasar di luar daerah. Kabid Industri pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe, *Henry*, di Lhokseumawe, menyatakan, ikan asin dan ikan olahan yang mampu menembus pasar luar daerah seperti ikan teri, ikan tenggiri, dan juga ikan kayu. Disebutkan, ikan asin atau ikan olahan tersebut jangkauan pemasarannya sampai ke Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat, bahkan ada yang sampai ke Pulau Jawa, terutama untuk jenis ikan teri kering. Dikatakan, ikan teri kering kebutuhannya di luar Aceh sangat banyak, karena selain tahan lama, juga mempunyai rasa yang enak, begitu juga dengan ikan kayu atau tenggiri kering. (<http://www-lkn Asin-kota Lhokseumawe-rambah-pasar-luar-aceh>, Rabu, 17 Oktober 2011).

Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, merupakan salah satu kota yang sebagian masyarakatnya hidup dengan mengelola sumber daya kelautan dan

perikanan yang ada di daerah tersebut yang belum diolah dengan maksimal. Didaerah Kota Lhokseumawe setidaknya ada 21 unit pengolahan ikan asin, antaranya, di kawasan Pusong Baru, Banda Sakti dan dikawasan Ujong Blang. Dari sistem kehidupan lingkungan masyarakat Kota Lhokseumawe yang sebagian besar menjadi nelayan. Maka lembaga Dinas Perikanan perlu memberikan dukungan, bantuan dan penyuluhan kepada para nelayan agar produksi ikan asin asal Kota Lhokseumawe dapat meningkat, yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan perlu diberikan peluang usaha budidaya ikan tangkap kepada para nelayan yang ada di pesisir pantai Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan pengawasan awal melalui wawancara dengan salah seorang pengusaha atau nelayan ikan asin di Pusong kawasan Kota Lhokseumawe, mengatakan bahwa untuk meningkatkan nilai produksi ikan asin, pertama harus diperhatikan nilai tangkapan ikannya, kedua cuacanya, dan ketiga kemampuan para nelayan untuk menjadikan ikan tersebut menjadi asin dan layak jual. Ia juga menambahkan bahwa dinas tidak peduli dan lepas tangan terhadap para nelayan dan pedagang ikan asin di Pusong Kota Lhokseumawe, bantuan yang diberikan oleh Dinas sangat minim, tidak sesuai dengan kebutuhan para nelayan ikan asin, tidak merata dan tidak bisa digunakan sesuai kebutuhan para pengusaha. (Observasi awal, 16 Februari 2018)

Bantuan yang diberikan tersebut ialah Mesin Pengeringan ikan, berdasarkan pemakaiannya mesin tersebut tidak bisa dipergunakan dengan efektif karena cepat rusak dan ikan yang dikeringkan dengan mesin tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para pengusaha dan nelayan, pengeringannya tidak merata dan ikannya cepat berbau busuk.

Dengan demikian, para nelayan disana lebih percaya dengan menjemur ikan asin dibawah terik matahari, dikarenakan para nelayanbisa membedakan kualitas dari hasil pengeringan dengan mesin dan dari hasil pengeringan dengan menjemur dibawah terik matahari. Ikan yang dijemur dibawah terik matahari lebih efektif, tidak cepat membusuk, tidak cepat berbau dan kualitas ikannya juga bagus. Sementara itu Penyuluhan yang diberikan oleh dinas juga belum efektif , dinas tidak mau turun tangan terhadap para pengusaha ikan asin dikota Lhokseumawe. Seharusnya pemerintah turun langsung ke lapangan(survei) untuk mengetahui apa yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha dan para nelayan ikan asin di Pusong, supaya apapun yang disalurkan oleh dinas bisa dipergunakan dengan efektif, agar produksi ikan asin bisa meningkat, guna untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup para pengusaha dan para nelayan dikota Lhokseumawe. (Wawancara Tarmizi, 12 Desember 2017).

Tabel 1.1
Data Produksi Pengeringan Ikan Teri Di Daerah Pusong Baru, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

NO	Produksi pengeringan ikan teri, Di Pusong Baru	
	Tahun	Produksi
1	2016	1.120 juta ton
2	2017	1.140 juta ton
3	2018	1.152 juta ton
4	2019	1.134 juta ton

Sumber: DKP3 Kota Lhokseumawe, 2019

Berdasarkan data di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa jumlah produksi pengeringan ikan asin teri di Pusong Baru wilayah Kota Lhokseumawe, dari tahun 2017-2018 cukup meningkat, itu disebabkan karena dukungan dari musim dan

cuacanya yang bagus untuk penjemuran ikan teri, serta adanya bantuan dari dinas, berupa alat tangkap, bot, jaring dan sebagainya untuk mendapatkan bahan baku berupa ikan teri saat berlayar. Sedangkan untuk tahun 2016, produksi pengeringan ikan asin teri relatif menurun, hal itu disebabkan karena cuacanya berangin dan musim hujan, serta kurangnya kepedulian dari dinas berupa bantuan yang diberikan. Untuk tahun 2018 sendiri, menurut Kasi Dinas Perikanan datanya belum di hitung, serta tidak ada bantuan apapun untuk tahun tersebut.

Berdasarkan masalah yang terjadi sekarang di Kota Lhokseumawe, bahwa Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan lepas tangan dan tidak peduli terhadap para nelayan ikan asin dikawasan Pusong. Para pengusaha dan para nelayan disana juga sangat membutuhkan bantuan dan sosialisasi dari dinas supaya produksi ikan asin dikota Lhokseumawe bisa lebih meningkat, dan ikan asin di Pusong memiliki kualitas yang bagus dan rasa yang siap jual. Bantuan yang diberikan oleh dinas pun sangat minim, tidak merata kepada para nelayan dan bantuan yang diberikan tidak tepat dengan kebutuhan para nelayan ikan asin di Kota Lhokseumawe tersebut. Sehingga apa yang disalurkan oleh pemerintah tidak bisa dipakai dengan maksimal oleh para nelayan yang ada di Pusong Baru

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan didaerah Pusong Baru, Banda Sakti kawasan Kota Lhokseumawe. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pengamatan peneliti, diketahui bahwa di Pusong adalah salah satu sentral produksi ikan asin dikota Lhokseumawe, produksi ikan asin di Pusong diketahui dalam beberapa tahun terahir ini menurun tingkat produktifitasnya, dikarenakan minimnya perhatian,

bantuan, modal usaha dan penyuluhan dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Pangan.

Menurut data dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, produksi pengeringan ikan teri dari tahun 2017-2018 relatif meningkat tingkat produktifitasnya, itu dikarenakan musim dan cuacanya sangat mendukung untuk penjemuran ikan asin teri, serta bantuan yang diberikan oleh dinas pun ada, seperti: perahu, bot, jaring dan sebagainya. Sedangkan untuk tahun 2018-2019 tingkat produksi bahan bakunya menurun drastis, hal itu disebabkan faktor musim yang berangin dan cuacanya sering hujan, serta bantuan dari dinas pun sama sekali tidak ada.

Pendekatan Penelitian

Salah satu karakteristik dalam penelitian ilmiah adalah metodologi. Dengan metodologi diharapkan data-data yang di dapat relevan dan valid serta dapat mempertajam analisa yang digunakan dalam menginterpretasikan data yang ada. Selain itu metode pada penelitian lebih menekankan kepada strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis da karakteristik dari data yang diperlukan.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sudarto (1997: 62) menyatakan penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan alasan penelitian ini mengutamakan syarat kualitas, dalam penelitian ini akan diperoleh pengetahuan sehingga mengerti dan memahami masalah bukan mengutamakan jumlahnya.

Pendekatan studi kasus yaitu pengujian yang mendalam dan merinci dari suatu konteks, dari suatu subjek, dari kumpulan dokumen atau dari suatu kejadian khusus. Sebagai strategi penelitian agar penulis dapat mengkaji tentang permasalahan yang bersifat faktual dan yang ada relevansi dalam melihat fenomena untuk mengkaji tentang Evaluasi Program Perikanan Terhadap Peningkatan Nilai Produksi Ikan Asin Teri yang ada di Kota Lhokseumawe. Sedangkan untuk metode penulisan disini penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat lembaga dalam mengatur kehidupan masyarakat, apakah sudah tepat atau ada penyelewengan dalam pendekatan penelitian ini, sehingga bisa membantu peneliti mengkaji lebih mendalam. (Muhadjir, 2000: 135).

Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang akan diwawancarai dan merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui informan akan memperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini. Adapun informan yang ditentukan berdasarkan *purposive*. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive*, karena dalam menentukan informan yang akan dimintai keterangan harus berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh informan itu sendiri, seperti, statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya dan kompetensi. Dengan harapan mereka dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Informan yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan penulis angkat antara lain:

- 1) Staff Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Pangan Kota Lhokseumawe
- 2) Kasi Di Bidang Produksi Perikanan di Dinas Perikanan Kota Lhokseumawe
- 3) Seksi di bidang Produksi Perikanan DKP3 Kota Lhokseumawe

- 4) Seksi di Bidang Kelautan DKP3 Kota Lhokseumawe
- 5) Tokoh Masyarakat Yang Ada Di Pusong Baru
- 6) Panglima Laot Pesisir pantai Kota Lhokseumawe
- 7) Nelayan
- 8) Pedagang, Dan
- 9) Masyarakat Pusong Baru

Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Menurut Sugiono (2008 : 137) berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian itu dilakukan. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah informan penelitian yaitu Pengusaha ikan asin Pusong, nelayan ikan asin Pusong, Kepala Dinas Kelautan, Perternakan dan Pertanian serta informan lainnya.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, laporan, jurnal, situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dan dokumentasi yang ada relevansinya dengan penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Suyanto (2006:172) mendefinisikan “Wawancara ini dilakukan oleh peneliti terhadap para informan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dalam bentuk tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *wawancara tidak terstruktur*. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan pada informan.

Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* dan *random* (acak). *Purposive* yaitu yang ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria informan itu sendiri seperti statusnya. Pemilihan sampel dimana semua anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. (Irawan, 2006: 10).

2. Observasi

Observasi yaitu merupakan suatu proses teknik pengumpulan data yang melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam kegiatan secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu, Herdiansyah (2010 :131). Dalam penelitian penulis mengamati langsung gejala-gejala yang terjadi dalam Peningkatan Nilai Produksi

Ikan asin teri di Pusong kawasan Kota Lhokseumawe, dan penulis juga mengamati gejala-gejala tentang hambatan yang dihadapi baik dari pihak dinas dalam menjalankan program peningkatan produksi, maupun dari pihak masyarakat sendiri dengan pelaksanaan program tersebut. Yang menjadi objeknya adalah tempat di produksinya ikan asin tersebut yaitu di Pusong kawasan Kota Lhokseumawe. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *observasi non partisipan*, dimana peneliti mendatangi langsung, mengamati, dan sebagaimana perilaku yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya terhadap objek yang diteliti, namun dalam hal ini peneliti tidak terlibat langsung dalam proses peningkatan nilai produksi tersebut.

3. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Iskandar (2009: 135) “studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk ditelaah secara instan sehingga dapat mendukung , menambah kepercayaan dan pembuktian masalah”. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini merupakan dokumen resmi.

Menurut Meleong dalam Herdiansyah (2010: 145-146), dokumen resmi dapat dibagi kedalam 2 bagian. Pertama dokumen internal, yaitu dapat berupa catatan, seperti memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulen rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi dokumennya adalah Undang-Undang dan Qanun Aceh tentang Evaluasi Program Perikanan Terhadap Peningkatan Nilai Produksi Ikan Asin Teri. Kedua, dokumentasi eksternal yaitu dapat berupa bahan-bahan informasi

yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Dokumentasi eksternal yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Dinas Kelautan, Perternakan dan Pertanian.

Dengan adanya dokumentasi maka sangat membantu peneliti untuk menggambarkan fakta secara aktual dalam penelitian ini yang terjadi dilapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 1999: 103)

Proses penelitian dengan menggunakan model analisis interaktif yang menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2001 : 1) mereka menyebutkan untuk pengumpulan data maka melalui proses sebagai berikut yaitu : Data koleksi, Reduksi Data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi perld dilakukan pengelahan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya dalam satuan konsep tertentu, atau tema tertentu. Selanjutya hasil reduksi sijadikan kedalam suatu bentuk tertentu (*display date*), sehingga data tersebut dilihat lebih jelas atau lebih sempurna.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Perikanan Terhadap Peningkatan Nilai Produksi Ikan Asin Teri Di Kota Lhokseumawe

Adanya evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan konstituennya, yaitu untuk menilai

sejauh mana tujuan tersebut dapat tercapai, karena evaluasi diperlukan untuk melihat “Kesenjangan antara harapan dan kenyataan”, dengan adanya evaluasi maka akan kita ketahui hasil yang terdapat dilapangan yang hasilnya bisa positif maupun negatif, tujuan dari evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan
4. Mengukur dampak dari suatu kebijakan
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, dan
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus menerus melakukan pembangunan, terutama pembangunan dibidang ekonomi. Seperti meningkatkan nilai tambah perikanan agar perekonomian masyarakat pesisir tercukupi. Didalam sebuah program, adanya evaluasi sangatlah diperlukan untuk menilai jalannya sebuah program, baik dari segi pemanfaatan, tingkat keberhasilan, dan pengawasan oleh pihak terkait dalam program tersebut.

Kecamatan Banda sakti merupakan salah satu sentral produksi ikan asin yang ada di Kota Lhokseumawe, baik dari segi produksi, pengolahan hingga pemasaran, namun karena kurangnya perhatian dari Dinas Perikanan membuat ikan asin asal Kota Lhokseumawe hanya di perdagangkan di wilayah tersebut saja, hanya sebagian pengusaha memasarkannya sampai keluar daerah Aceh.

Akibatnya, ikan asin yang di produksi di Pusong tidak ada peningkatanya dari tahun ke tahun dilihat dari perekonomian masyarakatnya yang tidak kunjung meningkat. Ikan teri asin asal Kota Lhokseumawe jangkauan pemasarannya sudah

merambah luar daerah Aceh, dikarenakan ikan teri asin peminatnya cukup banyak, karena rasanya yang enak, namun dikarenakan minimnya perhatian dari dinas, membuat ikan teri asal Kota Lhokseumawe hanya dipasarkan oleh pengusahanya saja tidak ada campur tangan dari lembaga.

Hasil wawancara dengan informan terdahulu diketahui bahwa keberhasilan dalam kegiatan perikanan adalah dengan adanya bantuan, penyuluhan, sosialisasi dan perhatian dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan, dengan tidak adanya hal tersebut maka para nelayan tidak akan pernah ada peningkatan dari segi perekonomian perikanan.

Bantuan adalah kunci utama untuk para nelayan dalam memulai usahanya tersebut, namun yang terjadi sekarang, untuk tahun 2017 tidak ada bantuan sama sekali untuk para nelayan dari DKP3 Kota Lhokseumawe, sehingga berakibat turunnya tingkat produktifitas pengeringan ikan asin yang ada di Pusong Baru. Dimana tanpa adanya bantuan maka para nelayan hanya mengandalkan peralatan seadanya untuk menangkap ikan segar di laut dan di produksi dan di olah menjadi ikan asin.

Selanjutnya, Pro dan kontra yang terjadi antara dinas dan masyarakat nelayan yaitu tentang minimnya bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat nelayan di Pusong, pemerintah lepas tangan terhadap para nelayan serta pemerintah tidak mempedulikan mereka, sehingga terjadilah ketidaksinambungan antara pemerintah dengan masyarakat nelayan yang ada di Kota Lhokseumawe. Penyuluhan yang diberikan dinas juga sangat minim untuk meningkatkan nilai produksi ikan asin teri, dimana para nelayan mencari cara sendiri agar produksi dapat bertambah dan meningkat.

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe kekurangan anggaran untuk memberikan bantuan pada para nelayan yang ada di wilayah kerjanya tersebut, kurangnya anggaran membuat dinas tidak turun langsung ke lokasi produksi ikan yang ada di Pusong, itu dikarenakan setiap staff dari dinas turun ke lokasi, para nelayan langsung melontarkan kata-kata yang kasar terhadap mereka, para nelayan hanya membicarakan soal bantuan dan bantuan yang tidak mereka salurkan. Dari hal itulah dinas malas untuk berurusan dengan masyarakat nelayan yang ada di wilayah kerjanya itu.

Keinginan pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas, Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan menjalankan program peningkatan nilai produksi perikanan merupakan salah satu respon atas keinginan dan aspirasi dari masyarakat nelayan, dimana responsivitas menurut Dwiyanto ialah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Namun realita yang berkembang di lapangan, sampai sekarang belum ada peningkatan nilai tambah produksi perikanan yang ada di Pusong baru Kota Lhokseumawe, dilihat dari perekonomian masyarakat nelayannya yang tidak kunjung meningkat. Sehingga responsivitas Pemerintah Kota Lhokseumawe belum optimal dalam meningkatkan kegiatan peningkatan produksi perikanan yang ada di wilayah kerjanya tersebut.

Hasil wawancara dengan informan terdahulu diketahui bahwa para nelayan dan pengusaha yang ada di Pusong Baru sangatlah membutuhkan bantuan dan perhatian dari DKP3 Kota Lhokseumawe agar produksi perikanan yang ada

diwilayah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, guna agar perekonomian masyarakat nelayan terpenuhi dilihat dari berlimpahnya bahan baku yang ada di pantai Kota Lhokseumawe.

Demikian juga halnya hasil wawancara dengan informan lainnya juga diketahui bahwa bantuan yang di berikan oleh DKP3 Kota Lhokseumawe tidak tepat sasaran kepada masyarakat nelayan yang ada di Pusong, bantuan yang di berikan ialah Mesin Pengeringan ikan yang pada pemakaian nya mesin tersebut tidak bisa digunakan oleh para nelayan disana, dikarenakan ikan yang di keringkan di dalam mesin tersebut cepat berbau dan berubah warna, sehingga para nelayan di Pusong sangat mempercayai menjemur ikan di bawah terik matahari yang hasilnya ikan tidak cepat berbau dan berubah warna.

Selanjutnya, harapan para nelayan agar produksi perikanan dapat meningkat ialah semestinya pemerintah turun langsung ke lapangan melihat bantuan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh para nelayan dan pengusaha ikan asin yang ada di Pusong. Para nelayan yang ada di Pusong sangat membutuhkan Mesin Freezer (mesin pendingin) ikan, yang hasilnya ikan yang setelah di jemur bisa dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Ikan yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut bisa bertahan hingga kurun waktu 2-3 bulan pemakaian, dan sebaliknya, ikan yang tidak dimasukkan ke dalam mesin tersebut hanya bertahan hinga waktu seminggu saja, dan setelah itu ikan berbau, berubah warna dan membusuk.

Jadi dapat disimpulkan, jika pemerintah memberikan bantuan berupa Mesin Freezer tersebut, maka dapat di pastikan produksi perikanan yang ada di Pusong Baru Kota Lhokseumawe dapat meningkat disegi produktifitasnya, karena jika ikan tidak laku dalam kurun waktu beberapa minggu, ikan asinnya masih segar

karena dimasukkan ke dalam mesin pendingin tersebut, tetapi sebaliknya jika ikan asin itu tidak laku dalam kurun waktu seminggu ikan tersebut akan membusuk dan di buang percuma, dari hal ini bisa dilihat bahwa setiap minggu di buang percuma kalau tidak habis laku, maka produksi perikanan tidak akan pernah meningkat. Semestinya disini pemerintah turun langsung ke lapangan melihat apa yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan.

Hal ini masih belum dijalankan dengan sepenuhnya amanat dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1), Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sehingga Pemerintah Kota Lhokseumawe diharuskan untuk mampu mencari sumber bantuan dan anggaran untuk meningkatkan nilai produksi perikanan dari sumber APBN Pemerintah Pusat.

Kendala Yang Dihadapi DKP3 Kota Lhokseumawe Dalam Meningkatkan Nilai Produksi Ikan Asin Teri, Meliputi Produksi, Pengolahan Dan Pemasaran.

Untuk mendukung kegiatan peningkatan nilai produksi perikanan yang dijalankan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, tidak semudah yang diharapkan dan sesuai dengan program peningkatan produksi yang telah disusun oleh DKP3 Kota Lhokseumawe. Berbagai kendala dan permasalahan tentu akan dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan nilai produksi perikanan tersebut, terutama di wilayah Pusong Baru yang produksinya tidak ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKP3) Kota Lhokseumawe berupaya meningkatkan nilai Produksi Perikanan yang ada di wilayah kerjanya tersebut, namun tidak semua program peningkatan berjalan sesuai dengan susunan perencanaan. Ada beberapa kendala yang membuat program dari DKP3 tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan target.

Kendala Produksi

Program Peningkatan nilai produksi perikanan yang dijalankan oleh DKP3 Kota Lhokseumawe terdapat kendala dari segi produksi. Adapun kendala-kendala dari segi produksi perikanan yang dihadapi oleh DKP3 Kota Lhokseumawe yaitu, sulitnya mendapatkan data jumlah produksi tangkapan ikan dari para nelayan, minimnya anggaran yang ada, serta tidak ada kerja sama antara dinas dan para nelayan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang menyebutkan bahwa DKP3 Kota Lhokseumawe telah berusaha untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang ada di Kota Lhokseumawe, tetapi hal ini terkendala dari segi pendataan yang dilakukan oleh DKP3, sulitnya mendapatkan data hasil tangkapan ikan pada para nelayan menjadi hambatan untuk dinas, itu di sebabkan minimnya bantuan yang diberikan oleh dinas untuk para nelayan sehingga para nelayan tidak mau memberikan data hasil tangkapan ikannya kepada dinas.

Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh dinas untuk disalurkan bantuan kepada masyarakat nelayan juga menjadi kendala, hal ini berakibat terjadinya pro dan kontra dan tidak ada kerja sama antara dinas dan masyarakat nelayannya,

sehingga terjadilah ketidaksinambungan antara dinas dan para nelayan yang ada di Pusong baru.

Demikian juga hasil wawancara dengan informan lainnya, kendala dari segi produksi juga terhambat pada cuaca kurang bagus untuk melaut, jika cuacanya hujan, berangin dan berkabut membuat para nelayan enggan untuk ambil resiko berlayar untuk mencari bahan baku. Untuk tahun 2017 sendiri cuacanya tidak menentu, sehingga untuk tahun 2017 produksi pengeringan ikan asin yang ada di Pusong sepi, itu dikarenakan para nelayan banyak yang libur mencari bahan baku karna cuacanya tidak menentu sehingga membuat produksi pengeringan ikan asin untuk tahun 2017 menurun drastis tingkat produktifitasnya.

Kendala produksi ikan asin yang ada di Pusong para nelayan masih sangat ketergantungan pada BBM sebagai salah satu komponen utama usaha untuk para nelayan pergi berlaut, serta terkendala juga para nelayan masih banyak menggunakan perahu tanpa bermotor untuk melaut yang membuat para nelayan hanya bisa berlayar tidak jauh dari tepi pantai dan alat tangkapan ikan yang para nelayan pakai juga masih sangat tradisional.

Kendala Pengolahan

Cuaca sangatlah berpengaruh terhadap pengolahan ikan asin, jika cuacanya kurang bagus atau musim hujan maka para nelayan tidak bisa menjemur ikan asin dengan optimal seperti biasanya, dan kurangnya bahan baku untuk di olah menjadi ikan asin juga menjadi kendala tersendiri untuk para pengolah ikan asin.

Hasil wawancara dengan informan terdahulu diketahui bahwa DKP3 Kota Lhokseumawe telah memberikan bantuan berupa Mesin Pengeringan ikan asin

untuk para nelayan, agar disaat musim hujan para nelayan bisa mengeringkan ikan di dalam mesin tersebut agar produksi ikan asin asal Pusong tidak terhenti karena musim hujan.

Tetapi pada praktiknya mesin tersebut tidak di pakai oleh para nelayan, para nelayan beranggapan jika dikeringkan dalam mesin tersebut ikannya cepat berbau dan membusuk. Dinas telah berupaya memberikan bantuan yang dibutuhkan, tetapi usaha dari dinas tersebut tidak di hargai oleh para nelayan. Sehingga mesin tersebut sampai saat ini sudah rusak karena tidak di pakai sama sekali oleh para nelayan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan penelitian terdahulu juga diketahui bahwa sudah dua bulan terakhir ini aktifitas penjemuran ikan asin yang ada di garis pantai Kota Lhokseumawe sepi, itu disebabkan karena minimnya hasil tangkapan ikan oleh para nelayan, yang berakibat kurangnya penjemuran ikan dan rendahnya tingkat produksi untuk beberapa bulan terakhir ini.

Para nelayan di Pusong baru sangat ketergantungan pada alam dalam segi pengolahan ikan segar menjadi ikan asin kering, skill para nelayan untuk membuat ikan asin ini juga sangat diutamakan.

Kendala Pemasaran

Ikan asin asal Kota Lhokseumawe terus merambah berbagai pasar tradisional di luar Provinsi Aceh yang mencapai 5 ton per harinya. Ikan asin teri asal Kota Lhokseumawe jangkauan pemasarannya sampai ke Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat bahkan ada yang sampai kepulau Jawa, terutama untuk jenis ikan teri kering, dimana ikan teri kering kebutuhan diluar Aceh sangat banyak,

selain untuk mencukupi kebutuhan lokal, ikan asin teri bisa tahan lama juga mempunyai rasa yang enak.

Dalam segi pemasaran produksi perikanan di Pusong Baru yang ada di dalam maupun di luar Aceh itu murni dari pengusaha ikan asin asal Kota Lhokseumawe, dan sama sekali tidak ada campur tangan dari dinas untuk segi pemasaran. Hal ini terjadi dikarenakan, disaat produksi dan pengolahan dinas tidak mempedulikannya, jadi dari segi pemasaran para pengusaha tidak mau berkerja sama dengan DKP3 Kota Lhokseumawe.

Dengan demikian, para pengusaha ikan asin teri di Pusong memasarkan ikan teri dan ikan asin lainnya secara pribadi. Menurut para pengusaha ikan asin yang ada di Pusong, kinerja DKP3 untuk memasarkan ikan asin yang ada di Kota Lhokseumawe tidak efektif, karena upaya dari dinas tidak ada sama sekali, yang membuat para nelayan dan pengusaha ikan asin teri harus memasarkan ikan asin asal Kota Lhokseumawe secara pribadi tanpa harus berkontribusi dengan DKP3 Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya jika ikan hasil tangkapan oleh para nelayan meningkat, maka harga dari ikan asin tersebut pun relative menurun, di,karenakan membludaknya hasil tangkapan ikan oleh para nelayan, tetapi jika sebaliknya, jika ikannya tidak banyak di dapat oleh para nelayan maka harga dari ikan tersebut pun sangat mahal oleh permintaan pasar.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemui di lapangan melalui pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Evaluasi Program Perikanan Terhadap Peningkatan Nilai Produksi Ikan Asin Teri Di Kota Lhokseumawe masih belum efektif, hal ini dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki DKP3 untuk disalurkan kepada para nelayan, pengusaha dan pedagang ikan asin yang ada di Pusong untuk meningkatkan nilai produksi perikanan. Selanjutnya, bantuan yang disalurkan DKP3 Kota Lhokseumawe juga tidak tepat sasaran kepada para masyarakat nelayan, bantuan yang diberikan yaitu mesin pengeringan ikan, yang mesin tersebut tidak bisa dipakai sama sekali oleh para nelayan, dikarenakan jika ikan dikeringkan dengan mesin tersebut ikannya cepat membusuk.

Kendala Yang Dihadapi DKP3 Kota Lhokseumawe Dalam Meningkatkan Nilai Produksi Ikan Asin Teri, Meliputi Produksi, Pengolahan Dan Pemasaran, dari segi produksi DKP3 mendapat kendala yaitu susahny mendapatkan data hasil tangkapan ikan tiap minggunya pada para nelayan dan minimnya anggaran untuk para nelayan dari dinas, kendala di segi pengolahan yaitu, mesin yang disalurkan oleh DKP3 untuk para nelayan tidak di pakai sama sekali, hingga membuat dinas malas untuk turun langsung memberikan penyuluhan agar produksi ikan asin dapat meningkat, serta kendala di segi pemasaran yaitu, para pengusaha ikan asin yang ada di Pusong Baru tidak mau ada campur tangan dari DKP3 dalam segi pemasaran, hal ini dikarenakan disaat produksi dan pengolahan dinas lepas tangan, makanya dari segi pemasaran para nelayan juga tidak membutuhkan bantuan dari dinas

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. Zainal, 2004, *Evaluasi Pengajaran*. Padang, UNP
- Addawyah, 2007, *Pengolahan Dan Pengawetan Ikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Akhmat Fauzi, 2010, *Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan Dan Pengelolaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Arifin, Zainal, 2010, *Evaluasi Program*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Arikunto, Suharsimi, 2009, *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn N. William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universitas Press
- Dunn N. William, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada, University Press
- Dwijowijoto, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo
- Eko Putro, 2009, *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodologi penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta:GP Press.
- Leo, Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.Cv
- Michael Quinn Patton, 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja, Rosdakarya
- Muhadjir, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Erlangga.
- Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta. PT,Elax Media Komputindo
- Putra. Ahimsa, 2003, *Dari Ekonomi Moral, Rasional, Ke Politik Usaha*. Yogyakarta. Kapel Press

- Sondang P. Siagian, 2004, *Teori Motivasi dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subarsono, 2010, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, 2001, *Upah Minimum, Upah Sektoral, Dan Produktifitas Sektor Industry Di Indonesia*. Bandung. Alfabeda.Cv
- Sudjana, Djudju, 2008, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT Remaja Cipta
- Supartha. Nyoman, 2005, *Pendekatan Holistik Membangun Agribisnis*. Penerbit : Bali Media Adhikarsa
- Rangkuti, 2008. *Teknik Membuat Rencana Pemasaran dan Analisis Kasus*. Jakarta : Gramedia.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sudarto, 1997, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta,cv,Bandung.
- Suyanto, 2006, *Metode Penelitian Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Winarno,F.G, 2008, *Kimia Pangan Dan Gizi*. Jakarta, Gramedia
- Yusuf Farida, 2000, *Evaluasi Program*. Jakarta: Renika Cipta

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DALAM PEMBINAAN KOPERASI
(Studi dinas perindustrian perdagangan dan koperasi Kota
Lhokseumawe)**

Lisa Iryani

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Email: *lisa.iryani @unimal.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini di dasarkan masih banyaknya koperasi tidak aktif daripada koperasi aktif yang tersebar di 4 kecamatan dalam Kota Lhokseumawe dengan jumlah koperasi hingga pada tahun 2018 sebanyak 300 unit koperasi dengan kategori Koperasi Aktif sebanyak 127 unit koperasi dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 125 unit koperasi termasuk 48 unit koperasi yang telah dibubarkan. Namun, pemerintah telah merancang berbagai program untuk membina koperasi yang tidak aktif menjadi koperasi aktif sehingga dengan kasus tersebut pembinaan yang selama ini berjalan belum dilaksanakan dengan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi dan kendala pembinaan koperasi di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan model menggunakan teknik purpasive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa startegi Pembinaan Koperasi di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan memberikan arahan atau konsultasi dengan melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi, Pembinaan, Pelatihan Manajemen Koperasi dan kunjungan ke lapangan secara langsung. Namun kendala yang dihadapi dalam pembinaan koperasi yakni keterbatasan sumber daya baik dari segi sumber daya manusia maupun anggarannya. Rekomendasi penelitian, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menguatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe hingga Pemerintah tingkat Gampong dengan melakukan sosialisasi dan meningkatkan sumber daya manusia maupun anggaran serta merevitalisasi Dekopinda dalam menguatkan langkah-langkah strategis dalam pengembangan koperasi sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: Koperasi, Strategi, Pembinaa

A. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai lembaga harus dilihat sebagai sistem sosial ekonomi dalam setiap upaya pemberdayaan agar koperasi tetap eksis, sehingga dalam penerapannya koperasi dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tingkat koperasi yang efektif dalam operasionalnya. Oleh karena itu sangat ditentukan oleh adanya organisasi dan manajemen yang baik, handal dan profesional. Keberadaan koperasi sebagai lembaga yang berjalan efektif dan mandiri sangat ditentukan oleh usaha koperasi akan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya yang didukung oleh kekuatan fundamental internal organisasi koperasi yang solid dalam mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri sehingga dapat mewujudkan kemandirian koperasi dan menciptakan manajemen serta organisasi koperasi yang baik.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/per/M.KUKM/III/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Neagara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 18/per/M.KUMK/VII/2006 Tentang Pedoman Teknik Bantuan Pekutaan Dalam Bidang Produksi Keapada Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22/PER/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Peringkatan Koperasi Menjelaskan bahwa koperasi usaha mikro,uasha kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Kota Lhokseumawe, pada tahun 2007 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp. 3 Miliar untuk koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe. Sebahagiannya mendapatkan Rp.50 juta, jika anggota koperasinya di bawah 50 orang. Sedangkan jika anggotanya di atas 50 orang, maka diberikan bantuan sebesar Rp. 150 juta. Selain itu, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias telah memberikan bantuan miliar rupiah pada sepuluh di koperasi Kota Lhokseumawe. Namun sebanyak 135 koperasi di Kota Lhokseumawe saat ini sudah tidak aktif. Koperasi yang tidak aktif akan di *black list*. Koperasi-koperasi tersebut tergolong dalam koperasi bermasalah dan tidak akan pernah mendapatkan dukungan modal usaha dari pemerintah kota tersebut. (Wawancara, 23 February 2019).

Banyaknya koperasi yang ada di setiap daerah, sangat memerlukan pembinaan baik bagi membangun dan melancarkan sebagai sebuah koperasi bagi masyarakat, sebuah koperasi juga harus memiliki aturan dan sistem hingga membuat koperasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal hingga tidak terdapat penipuan atau penyalahgunaan koperasi yang tidak sesuai aturan. Fenomena yang ada Banyaknya Koperasi yang sesuai dengan kriteria koperasi yang sesuai dengan aturan, kurangnya partisipasi Aktif Pengurus maupun anggota Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Lemahnya Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dan Lemah komunikasi antara Kecamatan maupun desa dengan dinas terkait serta lemahnya Sumber Daya yang dimiliki baik pemerintah maupun koperasi Dengan itu sangat diperlukan pembinaan bagi koperasi yang ada baik di setiap daerah maupun secara nasional hingga dapat terbentuk koperasi sesuai dengan tujuan awal terarah dan kepentingan masyarakat.

Tabel 1.1
Jumlah koperasi di Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Aktif (unit)	Tidak Aktif (Unit)	Total
1	2014	170	102	272
2	2015	180	102	282
3	2016	191	100	291
4	2017	119	175	294
5	2018	127	125	300

Sumber : Disperindagkop, tahun 2018.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian perdagangan dan koperasi (disperindagkop) Kota Lhokseumawe, jumlah jumlah koperasi pada tahun 2010 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 170 unit koperasi dan 102 dikategorikan tidak aktif dan total 272 unit koperasi, sedangkan pada tahun 2011 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 180 dan 102 dikategorikan tidak aktif dari total 282 unit koperasi, pada tahun 2013 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 191 unit koperasi dan 100 dikategorikan tidak aktif dari total 291 unit koperasi, pada tahun 2014 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 119 unit kopراسi dan 175 dikategorikan tidak aktif dari total 294 unit koperasi, sedangkan apada tahun 2015 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 127 dan koperasi tidak aktif sebanyak 125 unit koperasi dan koperasi sebanyak 300 unit koperasi. (sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018).

Koperasi Di Kota Lhokseumawe yang tersebar empat (4) kecamatan masih belum berkembang dengan baik, selama ini keberadaan koperasi kurang perhatian bagi stakeholder yang ada di Kota Lhokseumawe. Setiap tahunnya jumlah koperasi yang tidak aktif atau membubarkan diri seara tidak terdata semakin bertambah. Sehingga peranannya di tengah-tengah masyarakat masih rendah, keberadaan

koperasi belum mampu memberikan dampak pemberdayaan secara langsung bagi masyarakat, baik sebagai anggota atau masyarakat yang tidak terlibat sebagai anggota koperasi.

Hal ini sangat tidak sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe tahun 2017 yang bahwa dalam rangka meningkatkan SDM pengurus koperasi, Disperindagkop perlu mengadakan upaya pembinaan secara terus menerus kepada koperasi untuk dapat dibuka unit usaha koperasi, yang mendampingi unit usaha pokok dalam rangka melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang. Pada kenyataannya, hingga akhir tahun 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe masih belum maksimal dalam melakukan upaya pembinaan koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe dengan penelitian akan dilihat tentang strategi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Lhokseumawe dalam Pembinaan Koperasi di Kota Lhokseumawe. Pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan bahwa di kota Lhokseumawe ditemukan banyaknya koperasi yang sudah lama dibentuk, namun dari keseluruhan jumlah koperasi yang ada, kurang dari setengah jumlah tersebut yang tercatat aktif. Hal ini terjadi akibat kurangnya upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe sehingga peneliti merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang memudahkan peneliti untuk melihat persoalan secara nyata dan sesuai dengan realita yang berkembang di lapangan. Dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada, karena berbentuk pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung tidak dalam bentuk angka dan tabel. Penelitian ini juga mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang berlangsung dan berpengaruh dari fenomena. Penyajian data kualitatif terutama dari hasil wawancara bersifat informasi dan menerangkan dalam bentuk uraian. Data juga tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, namun berbentuk kalimat dan penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, tingkah laku dan peristiwa tertentu". (Moloeng, 2005:42).

Informan Penelitian.

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini “ *teknik purposive* ” dalam hal ini memilih berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Moloeng (2005:132), informan adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”.

Adapun informan yang di wawancarai sesuai dengan judul informasi yang diperlukan antara lain:

1. Zulfikri, SE.,MM selaku Kasubag Ekonomi dan Pembangunan Pada Kantor Walikota Lhokseumawe.

2. Armiami, S.Sos selaku Kabid Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di Kota Lhokseumawe
3. Dra. Anisawati selaku Kasi. Pembiayaan dan Simpan Pinjam Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di Kota Lhokseumawe
4. Nurmala Selaku Kabid Kesra Pada Kantor Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe
5. Ahmadi, selaku Keuchik Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
6. Ridwan selaku Keuchik Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Abdullah Selaku Kaur Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
8. Hamali, selaku Pengawas Koperasi Tugu Pahlawan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
9. Hj. Maria Ulfa Selaku Pengelola Dana BRR pada Koperasi Melati Sakti Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
10. Teuku Imran Usman, SE, Ak., CA selaku Ketua Pengurus Koperasi Afdhal Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
11. Mursyidah selaku Anggota Koperasi Melati Sakti Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
12. Sulaiman selaku masyarakat Gampong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)

Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif. Menurut Moloeng (2005:174), yang menyatakan bahwa “observasi partisipasi pasif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan cara mendatangi langsung, terlibat, kemudian mencatat perilaku sebagaimana yang telah terjadi pada keadaan yang sebenarnya mengamati sendiri ke tempat ketempat orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut”. Maka dalam penelitian ini peneliti mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek yang diteliti.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah melakukan komunikasi secara langsung dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik “wawancara tidak terstruktur adalah wawancara lebih bebas yang diajukan oleh peneliti kepada pihak informan bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, mendalami situasi sehingga peneliti lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder pelengkap data primer, yaitu pengumpulan data melalui dokumen resmi seperti peraturan

perundang-undangan, buku-buku, arsip, kutipan-kutipan yang di analisis, surat menyurat, laporan resmi, dan survei yang menggunakan pertanyaan terbuka.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data digunakan dalam peneliti ini adalah *analisis kualitatif* serta hasil wawancara ditampilkan untuk mendukung analisis. Analisa data digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian ini dengan menggunakan model analisis interaktif yang menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2005:5) ditempuh empat langkah yaitu:

1. Koleksi data

Koleksi data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian yang sangat penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses peneliti akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah-pilah menurut kepentingan pokok dan difokuskan untuk dipilih yang terpenting. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan. Data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti. Data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisihkan untuk disortir

menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu dan direduksi.

4. Verifikasi (Pengarikan Kesimpulan)

pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. Tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, pengamatan yang tertulis dalam lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel Daftar Keterangan Koperasi
Berdasarkan Kecamatan
Kota Lhokseumawe**

No	Kecamatan	Tahun									
		2016			2017			2018			
		A	TA	T	A	TA	T	A	TA	BB	T
1	Muara Satu	28	15	43	16	29	45	18	18	9	45
2	Muara Dua	36	24	60	20	40	60	21	30	10	61
3	Blang Mangat	102	54	156	64	93	157	69	71	22	162
4	Banda Sakti	25	7	32	19	13	32	19	6	7	32
	Jumlah	191	100	291	119	175	294	127	125	48	300

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, 2018

Keterangan;

A : Aktif

TA : Tidak Aktif
BB : Bubar
T : Total

Strategi Pembinaan Koperasi di Kota Lhokseumawe

Strategi merupakan rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan khususnya pembinaan koperasi di Kota Lhokseumawe dimana hal ini masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dari pada koperasi aktif yang tersebar empat kecamatan dalam Kota Lhokseumawe.

Pengaturan Strategi

Strategi akan terlaksana dengan baik jika terjadinya komunikasi yang efektif saat penyampaian informasi antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan masyarakat khususnya koperasi. Pemerintah kota Lhokseumawe dapat mensosialisasikan masyarakat dapat memahami dengan jelas tanpa adanya ambiguitas dalam memahami tujuan dari program tersebut dan menghindari terjadinya distorsi khususnya koperasi dalam hal pembinaan koperasi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pada tahun 2018 jumlah koperasi di Kota Lhokseumawe sebanyak 300 unit koperasi yang terdiri dari 125 unit koperasi dikategorikan tidak aktif dan yang kategori aktif sebanyak 127 unit koperasi serta koperasi bubar sebanyak 48 unit koperasi Kota Lhokseumawe yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni tidak melakukan rapat anggota tahunan selama 2 tahun berturut-turut dan tidak distornya simpanan wajib dan simpanan pokok kepada koperasi dimana 2 (dua) setoran ini menjadi modal koperasi dalam menjalankan usahanya, dalam hal ini yang termasuk dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Bab VII Pasal 41 Ayat (1) menjelaskan bahwa Modal Koperasi dapat bersal dari Modal Sendiri dan Modal pinjaman, kemudian diatur pada ayat (2) menyatakan

bahwa Modal Sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, Dana Cadangan dan Hibah. Kemudian dalam Bab VI Pasal 26 Ayat (1) menyatakan Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun dan Ayat (2) menyatakan Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Berdasarkan salah satu rumusan yang komprehensif tentang strategi yaitu menentukan dan menyampaikan tujuan organisasi dalam pengertian sasaran jangka panjang dan program bertindak. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi telah membuat program-program yang tertuang dalam rencana strategis satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012-2017 salah satunya program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi melalui Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Koperasi, Pembinaan dan Pembubaran Koperasi, Pelatihan Manajemen Koperasi dan Pelatihan Akuntansi dan Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil mikro serta Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dengan adanya program yang telah tertuang dalam Renstra tersebut populasi koperasi aktif dan jumlah anggota semakin meningkat sehingga strategi pemerintah Kota Lhokseumawe diarahkan melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait.

Strategi merupakan penentuan tujuan dari jangka panjang dan sebagai sebuah rencana koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Namun, selama ini strategi pembinaan yang diberikan oleh dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe hanya memberikan arahan pada saat dilakukan rapat berupa himbauan-himbauan.

Namun, sebagaimana pihak koperasi baik koperasi aktif maupun koperasi tidak aktif tidak diberikan dukungan baik arahan maupun program yang akan implementasikan sehingga pemerintah dan koperasi tidak bersinergi dalam mengembangkan kemandirian koperasi masing-masing berjalan dengan sendirinya khususnya pembinaan bagi koperasi itu sendiri hal ini sebagai mana permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Lhokseumawe yakni keterbatasan anggaran dan keterbatasan Sumber Daya yang ada pada Koperasi tersebut. Pengawasan yang tidak dilaksanakan secara ketat terhadap koperasi yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran juga menyebabkan strategi pembinaan ini belum berjalan dengan maksimal.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa masih sedikitnya partisipasi koperasi dalam ikut menjalankan kebijakan ini, masih banyaknya koperasi yang tidak aktif di Kota Lhokseumawe khususnya kecamatan Banda Sakti hal ini disebabkan masih kurangnya tingkat kesadaran anggota dalam membayar iuran simpanan wajib dan simpanan wajib pokok yang menjadi modal koperasi dalam mengembangkan usaha yang dijalankan dan operasional koperasi serta modal koperasi yang ada pun tidak mencukupi.

Pembentukan Pelaksanaan Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya koperasi tidak aktif adalah salah satu beban bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam membina, mengawasi dan mengembangkan koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe. Adapun sebab yang terjadi banyaknya koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe terhambatnya setoran pokok dan setoran wajib anggota kepada koperasi, tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan dan ketiadaan aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi itu sendiri dan kurang partisipasi daripada anggota koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi pada X Pasal 58 Ayat (3) menegaskan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dan kelembagaan usaha koperasi yang wilayah keanggotanya berada dalam 1(satu) Kabupaten/Kota, sedangkan Ayat (4) menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi koperasi.

Akan tetapi, yang terjadi dilapangan tidak semua koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe mendapat pembinaan, padahal Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapat pembinaan, padahal Pemerintah Kota Lhokseumawe telah merencanakan berbagai program salah satunya program Peningkatan Kelembagaan Koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan meningkatkan kelembagaan dan manajemen koperasi melalui berbagai kegiatan seperti Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Koperasi, Pembinaan dan Pembubaran Koperasi, Pelatihan Manajemen Koperasi dan Pelatihan Akuntansi

akan tetapi yang menjadi penghambatnya ialah keterbatasan anggaran sehingga tidak semua koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe diikutsertakan dalam program tersebut.

Salah satu koperasi yang ada di kota Lhokseumawe yakni koperasi Afdhal yang bergerak pada simpan Pinjam merupakan salah satu koperasi yang masih eksis hingga saat ini, mendapatkan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, tetapi tidak mendapatkan pembinaan dari Perintah Kota Lhokseumawe khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe hanya memberikan arahan.

Namun, salah satu Koperasi Wanita Melati Sakti merupakan salah satu koperasi yang masih aktif akan tetapi koperasi tersebut menerapkan sistem bagi hasil dengan anggota yang terdaftar dalam keanggotaan koperasi tersebut merupakan ibu rumah tangga, pedagangang untuk untuk membantu dalam segi permodalan usaha sehingga pengembaliannya dilakukan secara rutin.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe berpendapat bahwa, koperasi merupakan yang berbadan hukum akan tetapi mereka tidak boleh ada pihak luar yang mengintervensi akan koperasi tersebut. Sehingga pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dilakukan apabila koperasi meminta bantuan untuk dibina sesuai dengan kendala yang dihadapinya sehingga dinas tidak hanya membina dalam waktu hari aktif akan tetapi membina saat ada kesempatan seperti adanya Rapat Anggota Tahunan serta mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif lagi sehingga dapat membubarkan koperasi tersebut.

Kemudian ditemukan juga adanya pelimpahan kewenangan Walikota Lhokseumawe kepada Kecamatan salah satu kewenangan yang dilimpahkan yaitu Pengembangan dan Pembinaan Koperasi yang merupakan Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) dari pihak kecamatan itu sendiri. Namun desa memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa yang termaksud dalam Bab IV Pasal 18 menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan adat istiadat desa. Namun dalam Bab V Pasal 26 Ayat (2) Huruf (h) menyatakan bahwa Membina dan Meningkatkan Perekonomian Desa serta mengidentrgrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (2) Huruf (m) menegaskan bahwa mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partipatif. Namun, secara khusus gampong juga adanya kewenangan yang diatur dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe yang termaksud dalam Bab III Tentang Urusan Pemerintah Gampong Pasal 13 Ayat (3) Huruf (e) menjelaskan bahwa, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Namun berdasarkan temuan dilapangan, pihak kecamatan dan pihak desa tidak memiliki data keteragaan koperasi yang ada diwilayahnya sehingga tidak mengetahui bagaimana keadaan koperasi secara nyata dilapangan. Bahkan mereka

tidak juga mengetahui adanya program-program yang telah dicadangkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Strategi memiliki determinan umum yang terdiri dari komponen yang salah satunya adalah komunikasi, dimana secara implicit, jika komunikasi baik strategi akan berhasil. Namun dalam hal ini, terjadinya komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dengan masyarakat yang menyebabkan aparatur kecamatan, aparatur desa dan koperasi serta masyarakat belum merespon dengan baik terhadap Program Pembinaan Koperasi, bahkan masyarakat tidak mengetahui akan keberadaan koperasi yang ada didesanya sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan belum tercapai sesuai dengan harapan sehingga startegi pembinaan bagi koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe belum berjalan maksimal.

Kemudian pelaksana Pembinaan koperasi ialah Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi Bab X Pasal 58 Ayat (4) yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Daerah yang membidangi koperasi.

Namun sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah dimana kewenangan yang dimiliki mencakup hingga pemerintah tingkat desa sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe yang disebut dengan Pembina Tingkat Kota Lhokseumawe dan kecamatan disebut dengan Pembina Tingkat Kecamatan hingga desa atau gampong

yakni disebut dengan Pembina Tingkat Gampong yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala Dalam Melakukan Pembinaan Koperasi di Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi merupakan salah satu program yang tertuang dalam Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017, untuk mensukseskan Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Koperasi dan Pelatihan Akuntansi akan tetapi saat ini belum berjalan dengan maksimal, hal ini masih banyaknya koperasi tidak aktif daripada koperasi aktif yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe.

Hal ini dapat dilihat Koperasi secara keseluruhan pada tahun 2017 sebanyak 294 unit koperasi dengan kategori aktif sebanyak 119 unit koperasi dan kategori tidak aktif sebanyak 175 unit koperasi. Namun pada tahun 2018 sebanyak 300 unit koperasi dengan rincian kategori aktif sebanyak 127 dan tidak aktif sebanyak 125 unit koperasi dan 48 unit koperasi yang telah dibibarkan dan 6 unit koperasi telah bertambah, hal ini terjadi peningkatan jumlah koperasi yang tidak aktif hingga sebaliknya terjadi penurunan koperasi aktif di Kota Lhokseumawe.

Namun, faktor penghambat lain ialah keterbatasan anggaran, tidak sesuai dalam hal pembagian dana atau modal untuk koperasi, lemahnya koordinasi antar Satuan Kerja Daerah Kota Lhokseumawe, lemahnya koordinasi antara instansi dinas dengan kecamatan dan desa, dan belum adanya petunjuk teknis yang jelas dalam beberapa program, kurangnya pelatihan dan diklat bagi aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam membina koperasi yang ada di seluruh wilayah Kota Lhokseumawe sehingga menjadi

hambatan dalam perkembangan koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe juga kurangnya pengasan yang dilakukan oleh dinas, seharusnya berdasarkan defenisi dari strategi, strategi akan mencapai tujuan yang maksimal jika adanya koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.

Kendala Eksternal

Salah satu penghambat dalam menumbuhkan koperasi aktif ialah lemahnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe, lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan aparatur kecamatan yang ada di dalam Kota Lhokseumawe salah satunya Kecamatan Banda Sakti dan lemahnya koordinasi aparatur kecamatan dengan aparatur desa selama ini sehingga kewenangan yang melekat baik pada camat maupun pada keuchik yang ada dalam Kota Lhokseumawe khususnya Kecamatan Banda Sakti. Namun, tiadanya kantor serta pengelola koperasi ketika ditelusuri sehingga terbatas pula mengidentifikasi koperasi di lapangan dan pembinaa, pelatih serta terbatas pula kapasitas koperasi maupun pihak-pihak lain yang akan diikutsertakan pada saat pembinaan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Faktor penghambat lainnya ialah lemahnya partisipasi aktif anggota dalam membayar iuran pokok dan iuran wajib koperasi, kurangnya sosialisasi terhadap aturan baru kepada kecamatan, desa dan koperasi serta masyarakat. Adapun factor penghambat berdasarkan temuan dan analisa terhadap kondisi dan kelembagaan koperasi yakni ketiadaan Dewan Koperasi Indonesia yang ada di Kota Lhokseumawe sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian masyarakat bahwa, koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk

memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi. Adapun masalah salah satu kegiatan yang dijalankan oleh Dekopinda yakni melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, koperasi harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi. Namun seperti salah satu koperasi yang tidak aktif yaitu koperasi Syuhada yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa koperasi tersebut tidak pernah ada aktivitas, hanya terlibat papan namanya saja sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui akan aktivitas Koperasi Syuhada tersebut yang terletak di Pasar Impres Kota Lhokseumawe.

Namun, salah satu Koperasi Melati Sakti merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam merupakan salah satu koperasi aktif yang mendapatkan pembinaan berupa arahan dari Dinas Peindustriaian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe. Kemudian, koperasi tugu Pahlawan merupakan salah satu Koperasi yang aktif secara kelembagaan akan tetapi dalam keadaan vakum dan tidak ada aktivitas usaha yang dijalankan, hal ini tidak jelasan perguruan sehingga membuat koperasi tersebut koperasi tersebut terabaikan dan tidak ada pembinaan yang didapatkan oleh Koperasi Tugu Pahlawan ini selain hanya arahan yang mereka terima dari Dinas Peindustriaian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe.

Namun, sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, apabila implementor memiliki sikap dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan yaitu fokus pada kepentingan masyarakat maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Berdasarkan temuan lapangan

menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi telah menurun sebagaimana tidak jujur pengurus atau pengelola koperasi dalam berkoperasi sehingga masyarakat tidak mau berkoperasi. Kemudian partisipasi anggota dalam membayar iuran yakni simpanan pokok dan simpanan wajib masih rendah sehingga permodalan koperasi menipis sehingga banyak koperasi tidak aktif hanya berharap bantuan pemerintah.

Kemudian hambatan lain secara eksternal yakni belum meratanya kualitas sumber daya manusia setiap bidangnya, lemahnya kerja sama dan koordinasi antar institusi, dan keterbatasan anggaran serta lemahnya pemasaran dalam memasarkan produk yang dimiliki oleh koperasi dalam menunjang realisasi program dan kegiatan salah satunya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Kegiatan pendukung lainnya.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan di bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Pembinaan Koperasi di Kota Lhokseumawe yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe belum berjalan dengan maksimal hal ini pemerintah memberikan, konsultasi dan kunjungan ke lapangan guna melihat secara langsung akan tetapi tidak dilakukan secara rutin dengan melakukan Penilaian Kebaikan Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Koperasi, Pengarahan, Pelatihan Manajemen Koperasi dan Pelatihan Akuntansi.
2. Kendala strategi Pembinaan Koperasi hal ini disebabkan oleh hambatan internal yaitu lemahnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Kecamatan dan Desa, serta terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Sedangkan, hambatan eksternal lemahnya integritas dan kompetensi pengurus, anggota dan badan pengawas dalam mengelola koperasi serta rendahnya kesadaran anggota dalam menyetor simpanan Pokok dan Simpanan wajib dalam melakukan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori (2014). *Strategi Public relations*, Bogor : PT Akasara Pratama
- Barthos, Basir. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara : Jakarta
- Baswir, Revrison. (2010) *koperasi indonesia* , yogjakarta : BPFE-UGM
- Hasan, M. Iqbal, (2002).*Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hendrojogi. (2004). *Koperasi, Asaz-Asaz, Teori dan Praktik* : PT. Raja Grafindo
- Mathis, dan Jackson, (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- Moloeng, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexi J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Nitisusastro (2009). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta : Bnadung.
- Oliver, Sandra. (2006). *Strategi public Relation*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Pawito, (2007) *penelitian komunikasi kualitatif*, PT LkiS Pelangi Aksara, Bandung.
- Perdede, Pontas M. (2011). *Manajemen Strategi dan kebijakan perusahaan*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Purwonto, Iwan, (2004). *Manajemen Strategi, Yrama Widya*: Bandung.
- Rangkuti, Freddy, (2004). *Manajemen Persediaan: Aplikasi di Bidang Bisnis*, GrafindoPersada, Jakarta.
- Robert H. Hayes, Alfonsus Sirait (2006). *Manajemen strategi pembinaan*, PT Gelora Aksara
- Rudianto, (2006). *Akuntansi Manajemen, Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*, Gramedia, Jakarta.
- Silallahi, Ulber. (2009). *Metode penelitian sosial*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan. (2012). *Kinerja pegawai : Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subandi. (2010). *Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukamdiyo, Ign. (1996). *Manajemen Koperasi* : Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Sumarsono, Sonny. (2003). *Manajemen Koperasi*. Graha Ilmu Yogyakarta
- Suhartati Joesron, Tati. (2005). *Manajemen Strategi Koperasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Tangdilintin, Philips. 2008. *Pembinaan Generasi Muda*. Kanisius. Yogyakarta.
- Tanzeh, Ahmad (2009). *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras.

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA

Nanda Ameliany & Maysura
Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Email: *nanda.ameliany@unimal.ac.id*

ABSTRACT

This study talks about the Effect of Service Quality on Community Satisfaction Index at Dewantara Health Center in North Aceh Regency. In this researcher found several problems such as lack of discipline and lack of enthusiasm of service officers in providing fast and good services for patients, namely in providing nimble administrative services, in the implementation of officers. The waiting period for the queue is too long. And the finding of puskesmas employees who are not friendly, this can be seen from the way the employee talks is curt and looks rude when serving patients. not in accordance with puskesmas culture. The cornerstone of the theory in this study is the theory of customer satisfaction based on perspective. The research question in this study is whether there is an effect of service quality on the community satisfaction index. And the purpose of this study is to determine the effect of service quality on the community satisfaction index. The method used in this research is a quantitative approach with data collection techniques by interviewing, observing and taking part of the respondents of 100 respondents in the Community Health Center in Dewantara District. The results of this study indicate that there is a positive and significant effect between service quality variables on the community satisfaction index in the Dewantara Health Center, Dewantara District, North Aceh Regency. After testing the hypothesis, the results of calculations in this study are $t_{count} > t_{table}$ ($2,278 > 1,660$). So H_a was accepted H_o was rejected.

Keywords: *Service Quality, Community Satisfaction Inde*

ABSTRAK

Penelitian ini berbicara tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Di Puskesmas Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Pada peneliti ini ditemukan beberapa masalah seperti masih kurang disiplin dan masih kurang antusiasnya petugas pelayanan terhadap pemberian pelayanan yang cepat dan baik bagi pasien, yaitu dalam pemberian pelayanan administrasi tidak cekatan, dalam pelaksanaannya petugas. Masa tunggu untuk antrian terlalu lama. Dan Masih ditemukannya pegawai puskesmas yang tidak ramah, hal ini terlihat dari cara bicara pegawai yang ketus dan terlihat kasar saat melayani pasien. tidak sesuai dengan budaya puskesmas. Landasan teori dalam penelitian ini adalah teori kepuasan pelanggan Berdasarkan Perpektif. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap indeks kepuasan masyarakat. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap indeks kepuasan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan konsioner terhadap 100 orang responden di Pskesmas Kecamatan Dewantara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas pelayanan terhadap indeks kepuasan masyarakat di Puskesmas Dewantara Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Setelah dilakukan pengujian hipotesis, maka hasil perhitungan pada penelitian ini adalah nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,278 > 1,660$). Sehingga H_a diterima H_o ditolak.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Data Puskesmas Dewantara pada tahun 2016 sampai 2019 jumlah kunjungan Puskesmas Dewantara mengalami penurunan dalam kategori pasien umum dan pasien rawat jalan, tetapi pada kategori pengguna kartu sehat jumlah pengunjung

mengalami peningkatan 3000 orang/tahun atau 250 orang/bulan. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kecenderungan penurunan kunjungan pada pelayanan kesehatan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya yaitu karena derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, Atau faktor internalnya yaitu disebabkan enggan masyarakat untuk berobat ke unit pelayanan kesehatan dikarenakan kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pelayanan yang berkualitas tentu saja tidak sebatas senyum ramah dari para pegawai puskesmas saja, melainkan lebih dari itu. Menurut Parasuraman, Zeithamal, dan Berry dalam Lupiyoadi (2013:216) terdapat lima dimensi utama yang relevan untuk menjelaskan kualitas pelayanan yang dikenal dengan *service quality* (*servqual*) yaitu, *tangibel* (bukti fisik), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *emphaty* (empati). Kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut merupakan kunci utama untuk meningkatkan kepuasan pasien.

Puskesmas Dewantara terletak di Jl. Medan Banda Aceh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yang memiliki jumlah penduduk 13.890 jiwa dan pegawai yang bekerja di pukesmas dewantara sebanyak 189 Orang.

Tabel 1.1 Data Pegawai

No	Jabatan	Jumlah
1	PNS	110 orang
2	Honoror	9 orang
3	PTT	1 orang
4	Sukarela	69 orang

5	Jumlah	189 orang
---	--------	-----------

Sumber pukesmas Dewantara (2020)

Sebagai unit pelaksana Dinas Kesehatan merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang pertama di wilayah kerjanya masing-masing dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, Maka untuk mencapai keberhasilan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang, dan terpadu.

Tabel 1.2 Daftar Ketidakpuasan Masyarakat

No	Identifikasi Ketidakpuasan masyarakat	Jumlah	Persentase
1	Ruang tunggu sempit	10 orang	10%
2	Ruangan AC kurang	10 orang	10%
3	Lama menunggu antrian	30 orang	30%
4	Petugas tidak ramah	20 orang	20%
5	Ketepatan waktu petugas	40 orang	40%

Sumber : Pukesmas Dewantara (2020)

Hasil penelitian ini menunjukkan respon pasien terhadap ketidakpuasan masyarakat di Puskesmas Dewantara termasuk dalam kategori tidak puas karena ketidakpuasan masyarakat terhadap jawabannya lebih sedikit. Ruang tunggu sempit 10%, ruangan AC kurang 10%, lama menunggu antrian sebanyak 30%, Petugas tidak ramah sebesar 20% dan Ketepatan waktu petugas 40% . Responden mengeluhkan hanya sebagian saja dari 100 responden. Hasil penelitian lain oleh Mote (2008) di Puskesmas Ngesrep menunjukkan bahwa ketepatan waktu proses pelayanan dan keterbukaan waktu penyelesaian pelayanan dinilai sangat penting oleh pasien responden mengingat pasien perlu penanganan medis secepat mungkin.

Puskesmas Dewantara selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik terhadap seluruh pasiennya, pelayanan tersebut berupa kesungguh-sungguhan pihak puskesmas terhadap kepentingan pasien. Kesungguh sungguh ini terlihat pada saat pasien membuat surat keterangan sehat, pengurusan BPJS, dan sejenisnya diupayakan tidak melalui jalur yang susah dan berbelit, namun melalui jalur yang memudahkan dan tidak menyulitkan pasien.

Kepuasan masyarakat di bidang kesehatan merupakan tujuan yang harus diberikan oleh pemerintah daerah melalui Puskesmas, agar kepuasan masyarakat ini baik maka diperlukan kerja keras dan pemenuhan segala fasilitas maupun SDM yang dibutuhkan. Tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja dengan hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau pelayanan yang diberikan.

Kualitas pelayanan yang disediakan oleh puskesmas Dewantara belum dilaksanakan secara optimal. Secara umum masih terdapat kekurangan. Berdasarkan survey yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa masalah seperti masih kurang disiplin dan masih kurang antusiasnya petugas pelayanan terhadap pemberian pelayanan yang cepat dan baik bagi pasien, yaitu dalam pemberian pelayanan administrasi tidak cekatan, dalam pelaksanaannya petugas kedatangan makan dan mengobrol di ruang kerjanya. dan masih ditemukannya pegawai puskesmas yang tidak ramah, hal ini terlihat dari cara bicara pegawai yang ketus dan terlihat kasar saat melayani pasien. Tidak sesuai dengan budaya puskesmas. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengangkat tulisan ini yang

berjudul “**Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Di Puskesmas Dewantara Kabupaten Aceh Utara**”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan / inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui aparat pemerintah, walaupun tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, namun tetap harus mengutamakan kualitas pelayanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat. Aparat pemerintah harus menyadari posisi dan peran mereka sebagai pelayan masyarakat. Bila dimata masyarakat kesan yang muncul tidak demikian, berarti pelayanan yang diterima selama ini bukanlah produk pelayanan yang sepenuh hati.

Aparat pemerintah sebagai unsur pemerintah (melayani) terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur lain (yang dilayani). Sikap dan perilaku aparat pemerintah akan menjadi suatu ukuran keberhasilan pemerintah

untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan, dan masyarakat akan merasa puas serta tidak mengeluh.

Kualitas pelayanan publik merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Istilah kualitas pelayanan publik tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas. Beberapa contoh pengertian kualitas menurut Sedarmayanti (2009:252) adalah: (1) Kesesuaian dengan persyaratan; (2) Kecocokan untuk pemakaian; (3) Perbaikan Bekelanjutan; (4) Bebas dari kerusakan/cacat; (5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; (6) Melakukan segala sesuatu secara benar; (7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Sedangkan Menurut Hardiyansyah (2011:36), menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam hal ini, kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan.

Menurut Zeithamal dan Berry dalam Nasution (2001: 70) mengatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh lima dimensi yaitu, Beberapa indikator yang termasuk dalam dimensi layanan antara lain:

- a. Wujud (*Tangibles*)
- b. Keandalan (*Reliability*)
- c. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
- d. Jaminan (*Assurance*)

e. Empati (*Empathy*).

Dimensi layanan diatas, disebutkan memiliki lima indikator. Indikator pertama yakni wujud (*tangibles*), terdiri dari fasilitas, peralatan, penampilan karyawan dan sarana komunikasi. Kedua yaitu keandalan (*reliability*), terdiri dari kemampuan karyawan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dan keakuratan. Ketiga, daya tanggap (*responsiveness*), terdiri dari kesediaan karyawan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Keempat, jaminan (*assurance*), terdiri dari pengetahuan, kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Terakhir adalah empati (*emphaty*), yang terdiri atas peduli terhadap pelanggan dan perhatian perusahaan kepada pelanggan.

1.2 Jenis-jenis Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik mengandung makna adanya perubahan mutu, kondisi, dari keadaan sekarang ke mutu yang lebih baik. Jadi kualitas dalam hal ini bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terdapat tiga jenis yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan utilitas, pelayanan sandang dan pelayanan kemasyarakatan. Dari jenis-jenis pelayanan tersebut, pelayanan merupakan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun unsur-unsur proses dari pelayanan publik diperlukan agar dapat mendukung pelayanan yang diinginkan. Unsur tersebut terdiri dari penyedia layanan, penerima layanan, jenis layanan, kepuasan pelanggan. Adanya

unsur pelayanan yang baik dengan tersedianya karyawan dan sarana yang baik serta mampu memberikan kepuasan bagi pengguna layanan untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi dan memuaskan pelanggan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

2.1 Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut : Prosedur

pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya; Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya); Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati; Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; Keamanan pelayanan, yaitu

terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

2.2 Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah : Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja (SKPD atau Unit Pelaksana IKM) secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada (SKPD atau Unit Pelaksana IKM) sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan. (SKPD atau Unit Pelaksana IKM). Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada (SKPD atau Unit Pelaksana IKM) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut akan dilakukan di Jl Medan Banda Aceh Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Alasan memilih lokasi tersebut karena di puskesmas Dewantara masih sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat adalah tentang pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dimana jenis kuantitatif merupakan penelitian yang berbentuk angka untuk menguji suatu hipotesis dalam bentuk tabulasi data. Menurut Margono (2011) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berfikir deduktif untuk menurunkan hipotesis kemudian melakukan pengujian dilapangan dan kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris. Oleh karena itu menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran empiris. Dengan populasi masyarakat pengunjung pukesmas dewantara sebanyak 450 orang dengan sampel 81 orang yang telah di olah menggunakan rumus. Berikutnya Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden degan alat ukur menggunakan skala likert. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Serta jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

D. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Dewantara. Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas akan dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Dewantara. Dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,259. Artinya, kualitas pelayanan hanya memberikan pengaruh sebesar 25,9% terhadap indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Dewantara, sedangkan sisanya 74,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil uji regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi sebesar 82,972%, hal ini dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan akan mengakibatkan indeks kepuasan masyarakat sebesar 829,72%. Dari hasil uji parsial yang telah dilakukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh, berpengaruh secara parsial terhadap indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Dewantara, yang artinya kenaikan kualitas layanan yang dicapai oleh setiap puskesmas yang diamati secara nyata berpengaruh terhadap indeks kepuasan masyarakat, alasannya karena memiliki nilai signifikan $> 0,05$.

Berdasarkan hasil olah data, variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kepuasan masyarakat yang dibuktikan dengan t hitung 2,656 hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Dewantara.

Hasil penelitian ini semakin memperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Siti Masruroh (2006) meneliti tentang “Pengaruh Pelayanan keperawatan terhadap indeks kepuasan masyarakat di puskesmas Bayuwangi.” Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ada pengaruh dan hubungan yang berarti positif/baik

yaitu masyarakat dengan layanan puskesmas Bayuwangi terhadap indeks kepuasan masyarakat yang erupakan sebagai indikator kepuasan pelayanan masyarakat.

Kualitas pelayanan dilihat dari sudut pandang persepsi masyarakat bukan dari pihak penyelenggara atau penyedia layanan, karena masyarakat yang merasakan pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat yang harus menilai dan menentukan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan publik dikatakan memuaskan jika layanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang diharapkan.

Faktor utama yang mempengaruhi kepuasan dari masyarakat adalah apabila masyarakat merasa apa yang diinginkannya terpenuhi dengan maksimal. Membangun kepuasan masyarakat merupakan inti dari pencapaian jangka panjang. Apabila tingkat harapan tinggi, sementara pekerjaannya biasa-biasa saja, kepuasan tidak akan tercapai. Sebaliknya, apabila pekerjaan melebihi apa yang diharapkan, kepuasan akan meningkat. Karena harapan yang dimiliki masyarakat cenderung selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat dinilai dari kesesuaian harapan yang menentukan kualitas dari pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Dewantara, persepsi kinerja untuk memperoleh pendapat masyarakat mengenai disiplin kerja pegawai, penilaian pelanggan digunakan untuk menilai baik tidaknya pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Kecamatan Dewantara kepada masyarakat jika dibandingkan dengan Puskesmas lainnya. Kualitas pelayanan publik dan disiplin kerja merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan publik dalam memuaskan masyarakat, maka akan menyebabkan kepuasan masyarakat yang tinggi pula.

Kualitas pelayanan publik mempunyai pengaruh yang bersifat langsung

terhadap kepuasan 100 masyarakat. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan pelanggan sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan, maka pelayanan tersebut dianggap berkualitas dan memuaskan. Kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh disiplin kerja. Disiplin kerja yang tinggi menghasilkan kepuasan masyarakat yang tinggi pula. Pegawai yang mempunyai disiplin kerja tinggi akan lebih bertanggungjawab dengan pekerjaan yang diamanakan kepada pegawai tersebut. Sehingga apabila disiplin kerja tinggi maka akan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sehingga masyarakat akan merasa lebih puas dengan hasil kerja pegawai. Kualitas pelayanan publik dan disiplin kerja secara bersama-sama harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan pengujian dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap indeks kepuasan masyarakat di Puskesmas Dewantara Kabupaten Aceh Utara, maka hasil perhitungan pada penelitian ini adalah nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,656 > 1,984$). Sehingga H_0 diterima H_0 ditolak. Yang berarti bahwa secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh terhadap terhadap indeks kepuasan masyarakat di Puskesmas Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, L. Leonard and Parasuraman A. 2001 .A Marketing services. New york: The Free Press
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media.
- https://twitter.com/fktp_dewantara
- <https://www.slideshare.net/pelayanan/kepmen-pan-nomor-25-tahun-2004-tentang-pedoman-umum-penyusunan-ikm-unit-pelayanan-instansi-pemerintah>
- Margono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Masruroh, Siti. 2006. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal). Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 4.
- Nasution. 2001. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management. Jakarta.
- Rahmah Hida dan Wiko (2011). Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Index of society's Satisfaction Toward Health Service.Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
- Sedarmayanti. 2009:252. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Bandung
- undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Zeithaml, ValerieA., A. Parasurman & Leonard L. Berry. 1990. Delivering Quality Service. New York : The Free Press.

REVITALISASI ENTREPRENEURSHIP DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN UMAT

Nursanjaya

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Email: nursanjaya@unimal.ac.id

ABSTRACT

National economic development, apart from bringing positive economic growth among the ummah, also creates socio-economic disparities between large, medium and small entrepreneurs. This situation is certainly not good for the Islam community in particular and the Indonesian nation. So the revival and progress of the Muslim economy must be a supporting factor for the revitalization of entrepreneurship in building the economy of the Ummah. For this reason, a solution to the economic system is needed that is further away from the true essence of justice. The emergence of various innovations in the world of entrepreneurship in the field of sharia-based economics, the formation of a network of Islamic economic institutions, the implementation of various human resource development trainings to produce reliable and professional entrepreneurs but not to lose their faith and national identity, are dreams and aspirations to revitalize entrepreneurship in building the economy of the people.

Keywords: *revitalization, entrepreneurship, people's economy.*

A. PENDAHULUAN

Tatanan ekonomi Indonesia pasca-reformasi, setidaknya dalam praktek, telah berubah drastis menjadi liberal-kapitalistik. Kondisi ini tampak jelas ketika ekonomi usaha kecil tidak lagi ada proteksi di tengah gempuran pendirian mall dan supermarket yang secara generik disebut pasar modern. Bahkan sekarang ini, di tengah pemukiman warga, telah menjadi fenomena luas persaingan yang tidak seimbang antara bisnis pemodal besar dengan pelaku usaha kecil, antara minimarket milik sebuah korporasi dengan warung kelontong lainnya. Dan persaingan ini dibiarkan berlangsung secara bebas dengan segala akibatnya, padahal pada dekade 1990-an, ada peraturan pemerintah mengenai pendirian mall

dan supermarket atau minimarket ini di daerah yang padat pemukiman penduduk. Peraturan ini dibuat untuk menjaga dan melindungi pelaku usaha ekonomi kecil dan pasar-pasar tradisional. Ironis, akhir-akhir ini, banyak pelaku usaha ekonomi kecil yang gulung tikar dan menghentikan usahanya karena gempuran para pemodal besar. Sementara pasar tradisional juga mengalami nasib yang mengenaskan, kalah bersaing akibat ekspansi pembangunan pasar-pasar modern.

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33, secara tegas bahwa bahwa perekonomian nasional Indonesia harus mengutamakan kemakmuran masyarakat dan keadilan sosial menjadi tujuan ekonomi kerakyatan ini. Dan negara harus berperan penting dan bertanggung jawab untuk melindungi serta menjamin kesejahteraan dan kepentingan rakyatnya. Sejatinya, reformasi yang terjadi di Indonesia harusnya mampu mewujudkan amanat para pendiri negara yang dibakukan dalam UUD 1945, sebagai konstitusi negara. Namun, yang terjadi adalah inkonsistensi antara doktrin yang tertulis dalam konstitusi dengan praktek sistemnya. Di satu sisi, kesuksesan kebijakan ekonomi pasca-reformasi dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi patut diapresiasi. Namun pertumbuhan ini harus berguna bagi rakyat banyak, bukan terbatas bagi kalangan tertentu yang diuntungkan secara sepihak.

Konsep ekonomi Islam muncul di tengah konstelasi pemikiran ekonomi sebagai akibat adanya gerakan Islamization of Knowledge. Ekonomi Islam muncul di saat perekonomian modern lambat dalam menghadirkan solusi atas problematika ekonomi kontemporer, khususnya probematika terhadap dunia entrepreneur. Sejatinya, istilah dan gagasan ekonomi Islam ini lahir sebagai refleksi atas ke-kaffahan keislaman seorang muslim. Pemikiran ini muncul sebagai tuntutan atas

keyakinan terhadap komprehensifitas ajaran Islam yang tidak hanya mengajarkan pembentukan keshalihan pribadi, tetapi juga pembentukan keshalihan sosial-ekonomi dan lainnya. Ajaran Islam tidak terbatas pada ritual dan hubungan transendental seorang hamba terhadap Allah, namun juga mewarnai seseorang pada ruang publik kehidupannya, salah satunya adalah pertumbuhan dunia entrepreneur di tengah umat Islam.

Umat Islam harus menyadari bahwa dengan jumlahnya yang mayoritas di Indonesia, sudah seharusnya menjadi naungan dan tiang perekonomian nasional di tengah perubahan yang terjadi di dunia. Karenanya, konsep ekonomi Islam sebagai konsep yang rahmatan lil alamin patut dimanifestasikan dalam suatu tindakan yang melingkupi peningkatan kesejahteraan, pemerataan kesempatan, penegakan kebenaran dan keadilan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Tantangan ke depan, baik dalam lingkup regional maupun internasional mengharuskan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam perlu lebih berperan dalam peta perekonomian dunia. Krisis ekonomi yang berkali-kali menghantam perekonomian dunia perlu dijadikan pelajaran berharga bagi para entrepreneur muslim untuk turut serta mencari jalan keluar pemecahan sistem ekonomi yang ada saat ini. Konsep ekonomi Islam yang oleh sebagian kalangan non muslim diakui sebagai konsep anti krisis menjadi sebuah sintesa bahwa sudah saatnya konsep ini harus terintegrasi tidak hanya di sektor keuangan saja, melainkan di seluruh sektor bisnis yang ada.

B. PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi syariah dalam bentuk lembaga perbankan dan keuangan syariah yang sangat pesat saat ini, seharusnya dibarengi dengan peningkatan etos entrepreneurship umat Islam. Semangat entrepreneurship ini harus dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam gerakan ekonomi syariah. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah saatnya menjadikan entrepreneurship sebagai salah satu materi wajib dalam kurikulum pendidikan, baik di pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Demikian pula halnya dengan ormas-ormas Islam, agar termotivasi untuk mendorong anggotanya agar mengembangkan entrepreneurship sebagai upaya pengembangan pribadi dan keberlangsungan organisasi. Dan sudah saatnya juga para ulama dan da'i agar memotivasi jamaahnya untuk merevitalisasi etos entrepreneurship yang selama ini kurang menjadi topik dakwah di tengah umat. Upaya untuk merevitalisasi entrepreneurship umat Islam ini dipengaruhi oleh beberapa pemikiran.

Pertama, sejak kelahirannya, umat Islam memiliki jiwa dan etos entrepreneur yang tinggi. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad dan sebagian besar sahabat adalah para pedagang dan entrepreneur sukses di berbagai bidang perniagaan. Bahkan proses penyebaran ajaran Islam ke penjuru dunia hingga abad ke 13M dilakukan oleh para pedagang muslim, sebagai bukti bahwa etos entrepreneurship sangat melekat dalam diri umat Islam.

Kedua, kondisi perekonomian umat Islam di Indonesia yang telah lama terpuruk, maka diperlukan revitalisasi entrepreneurship umat Islam untuk membangun kembali perekonomian umat. Fenomena kemerosotan umat Islam di bidang ekonomi, seperti problem kemiskinan dan keterbelakangan akibat

termarjinalkannya ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan salah satu faktor kuat untuk kembali merevitalisasi entrepreneurship dengan membangun perekonomian umat dan memberikan perlindungan terhadap para pengusaha muslim.

Ketiga, kehadiran berbagai lembaga perbankan dan keuangan syariah sudah seharusnya juga diimbangi dengan tumbuh-berkembangnya para entrepreneur syariah. Revitalisasi entrepreneurship akan menumbuhkan etos yang tinggi dalam dunia usaha, khususnya bagi generasi umat akan berdampak positif terhadap kemajuan dan perkembangan ekonomi umat, sebagaimana pernah terjadi di masa silam dimana umat Islam menguasai perekonomian dunia.

Pengusaha Muslim dan Problematika Perekonomian Nasional

Syariah Islam sebagai sistem dan pedoman sudah banyak dilaksanakan dalam dunia bisnis saat ini. Misalnya, perbankan syariah yang tidak hanya dalam tataran dalam negeri tetapi juga sudah merambah ke Eropa dan Amerika. Saat ini hampir semua sektor bisnis dimasuki oleh sistem syariah, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lainnya. Hal ini tentu harus didukung oleh para entrepreneur muslim, karena ada kepentingan besar untuk menyelamatkan dan menjaga perekonomian umat Islam tetap dalam bingkai syariah. Entrepreneur muslim harus menghadirkan kembali jiwa dan semangat kewirausahaan di kalangan umat, menumbuhkan kesadaran bahwa umat Islam tidak hanya eksis di bidang sosial dakwah saja, tetapi juga eksis sebagai kekuatan ekonomi. Dan untuk membangun kekuatan sosial dakwah plus kekuatan ekonomi, maka sangat diperlukan adanya revitalisasi entrepreneurship, kewirausahaan dan kompetensi manajerial yang andal.

Revitalisasi entrepreneurship bagi pengusaha Muslim di Indonesia masih menemukan adanya probematika atau kelemahan utama. Pertama, posisi tawar-menawar yang rendah, knowledge dan skill yang masih belum terintegrasi secara komprehensif dan mindset yang masih melihat dari sisi keuntungan duniawi sebagai hal yang utama. Padahal, untuk membangun pola pikir ekonomi yang baik, perlu ada gerakan *–al-hayatu tajri badun wat tajri badun minal hayasi*. Intinya, hidup itu adalah inovasi yang harus dilakukan secara terus-menerus, karena ini yang akan menentukan jalan hidup seseorang. Dan untuk itu, pengusaha Muslim harus mengubah mindsetnya agar mampu mengintegrasikan knowledge dan skill dalam membangun dunia entrepreneur sehingga memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi dengan landasan ekonomi syariah.

Kedua, sisi entrepreneurship yang rendah, karena masih dengan skala berpikir bagaimana membuat ‘orang yang sangat miskin’ menjadi ‘orang yang agak tidak miskin’. Dan memang kondisi sebagian besar pengusaha Muslim di Indonesia masih menganut cara berpikir tradisional seperti ini. Karenanya, pola pikir seperti ini yang mesti diluruskan dengan paradigma yang lebih baik, yaitu bagaimana membuat ‘orang yang sangat miskin’ menjadi ‘orang yang sejahtera’. Untuk itu, harus dibangun jiwa-jiwa wirausaha yang mandiri dan kuat dengan dukungan semua pihak agar pengusaha Muslim bisa mandiri dan memiliki kemampuan dalam menjalankan dunia usahanya.

Ketiga, pemberdayaan internal yang masih lemah karena tidak terbangun kekuatan ekonomi kolektif. Masih ada pengusaha Muslim yang sudah go national maupun go international yang enggan membagikan ilmu dan pengalamannya terhadap pengusaha Muslim yang baru tumbuh atau yang masih tersendat usahanya.

Adanya beberapa ormas Islam atau konsorsium pengusaha Muslim yang harusnya bisa menjadi penggerak dan memberikan fasilitas serta membantu mengembangkan usaha-usaha pengusaha Muslim lainnya. Misalnya, melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti dengan follow up yang serius dan berkelanjutan. Sebab, masih banyak pelatihan kewirausahaan yang ada hanya sekedar pelatihan saja, tidak dikelola secara serius dan sebagai kegiatan tahunan untuk menghabiskan anggaran. Bahkan ada pelatihan pemberdayaan entrepreneur dan ekonomi yang diselenggarakan oleh sebuah kementerian atau instansi lainnya yang berorientasi proyek dengan cara memangkas waktu pelaksanaan dari seminggu menjadi 3 hari, tidak ada follow up, apalagi pendampingan hingga mampu mandiri.

Keempat, network nasional dan internasional yang masih belum terbangun dengan baik, padahal ini sangat penting. Tentu sifatnya harus lintas agama, etnis, dan lainnya. Karena dalam menjalankan entrepreneur tidak boleh dibatasi dengan sekat-sekat sektoral dan primordialisme seperti ini. Jika mengambil contoh dalam dunia entrepreneur Islam, maka khalifah Utsman bin Affan adalah contoh terbaik. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau memberdayakan UKM di Madinah yang dihubungkan dengan UKM Makkah, UKM Urdu di Yordan, lalu ke Persia dan Abbessiniya Nasrani. Hasilnya adalah tumbuhnya kemakmuran di Madinah dan itu juga menjalar ke seluruh wilayah kekhilafahan masa beliau. Poin ini yang menjadi kelemahan pengusaha Muslim di Indonesia, dan sudah seharusnya ada upaya sinergi strategis untuk membangun network yang lebih baik di tingkat nasional dan internasional.

Oleh karena itu, para pengusaha Muslim harus menyatukan ide dan gagasan yang tujuannya adalah mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta

dan berdaya saing tinggi, dalam rangka menciptakan masyarakat sejahtera secara materil yang didukung dengan nilai-nilai keimanan, dalam sebuah wadah yang profesional. Ada beberapa tujuan yang bisa diwujudkan oleh pengusaha Muslim dalam mengimplementasikan gagasan ini, yaitu: (1) membuka dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Muslim Indonesia, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antara potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antar-skala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat, jujur, adil, amanah, dan halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah; (2) menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan kesetaraan dan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Muslim Indonesia sehingga dapat berperan secara efektif dalam pembangunan nasional, pembangunan tata ekonomi dan percaturan perekonomian global; dan (3) menegakkan dunia usaha di atas pilar ekonomi syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan serta menjadikan dunia usaha berdiri di atas pondasi ekonomi syariah berdasarkan ukhuwah, syariah, akhlak dan aqidah.

Peran Pengusaha Muslim dalam Membangun Ekonomi Berbasis Syariah

Pengusaha Muslim adalah orang Islam yang mempunyai profesi sebagai pengusaha/pedagang/saudagar, yang beritikad untuk mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam rangka menciptakan masyarakat sejahtera secara spiritual dan materil. Karenanya, pengusaha Muslim hendaknya berupaya menegakkan dunia usaha di atas pilar ekonomi berbasis syariah, menegakkan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan

bersama serta menjadikan dunia usaha berlandaskan akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah. Untuk itu, pengusaha Muslim harus berorientasi pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan dunia usahanya, yakni dengan fokus pada:

1. ke-Islaman yang diwujudkan dalam bentuk ukhuwah dan silaturrehim dalam membina dan mengembangkan ta'aruf (saling mengenal), ta'awun (saling menolong), dan tausiyah (saling berwasiat di jalan yang benar) guna memperkokoh upaya mewujudkan masyarakat madani;
2. ke-Indonesiaan yang dicerminkan dengan upaya memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dalam bentuk berbagai kegiatan yang tetap memperhatikan ke-Bhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia;
3. keusahaan yang diwujudkan dalam kegiatan pembangunan ekonomi rakyat berbasis syariah, dalam menjunjung harkat dan martabat rakyat kecil serta memperjuangkan kaum lemah menjadi sejahtera secara ekonomi dan keimanan; dan
4. kemandirian yang dicerminkan dalam sikap memiliki otonomi dalam pemikiran, pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan secara swadaya, terutama bertumpu pada kemampuan pemikiran upaya dan sumber daya sendiri, sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya, ekonomi syariah dan menjalankan wirausaha berbasis syariah adalah fitrah manusia, yang ditetapkan Allah dengan seperangkat aturan yang menjadikan pelaku usaha lebih dekat pada Allah dalam ubudiyah dan memiliki kepedulian sosial dalam muamalah. Upaya yang serius dan terprogram dengan baik untuk menjalankan kewirausahaan berbasis syariah akan berdampak pada kesejahteraan, keadilan dan kedamaian dunia, serta kesinambungan generasi

yang unggul dan kompetitif dalam dunia entrepreneur dengan mengedepankan ketaqwaan kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

Konsep dan praktek ekonomi nasional dewasa ini disadari atau tidak telah terkontaminasi oleh polusi sekuleris dan permissif, sehingga banyak entrepreneur Muslim lalai akan fungsinya dalam membangun ekonomi berbasis syariah. Ketidakpekaan sebagian pengusaha Muslim terhadap lingkungan membuat watak keserakahan mendominasi sebagian pengusaha Muslim, dan ini memunculkan sikap egoisme dalam keberhasilan wirausaha masing-masing dibandingkan dengan membangun kepentingan umat yang lebih besar. Kesenjangan ini terjadi karena perubahan sistem ekonomi tidak akan menjamin terjadinya perbaikan ekonomi jika manusia yang menjadi pelaku wirausaha dan pembuat kebijakan yang menegakkan sistem tidak “berakhlak baik”. Jika ditelusuri lebih jauh, terjadinya kesenjangan ini lebih disebabkan tidak adanya penanaman pemahaman dan penjelasan detil tentang upaya pemberlakuan Islamic Economic System, salah satunya adalah Islam Moral Principles yang bersifat universal dalam sistem perekonomian.

Islam mengajarkan prinsip rahmatan lil alamin yang sangat sesuai untuk diterapkan pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai contoh, praktek korupsi, monopoli, oligopoli, dan berbagai manipulasi harus dicegah karena tidak sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Prinsip ini mengajarkan manusia untuk memakmurkan dunia dan seisinya secara baik dan benar, tidak berlaku zhalim dan tidak adil, sehingga prinsip rahmatan lil alamin yang benar akan mendorong pembangunan yang inclusive dan berkelanjutan dengan mempertahankan daya dukung ekosistem untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengusaha Muslim hendaknya berperan aktif dalam membangun keadilan ekonomi berbasis syariah. Peran ini tentu harus didukung dengan landasan etika bisnis, di atas prinsip-prinsip bisnis berbasis syariah dan good corporate governance. Pengusaha Muslim dalam menjalankan bisnisnya dapat merujuk asas-asas yang telah dibangun sistem ekonomi Islam sebagaimana pondasinya didasarkan dengan sifat-sifat nubuwah (kenabian) yang disebut SAFT, yakni:

1. Shiddiq (benar dan jujur) sebagai etika bisnis. Pengusaha yang senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam segala bentuk usahanya, jujur pada diri sendiri, nasabah, pemegang saham, mitra, maupun pada kompetitor, akan memunculkan kepercayaan publik dan dunia usaha padanya;
2. Amanah (terpercaya dan kredibel). Artinya, seorang pengusaha Muslim harus membangun sikap dapat dipercaya, bertanggung jawab dan memiliki kredibilitas. Amanah dalam menjalankan bisnis, mengambil haknya secara benar, tidak mengurangi hak orang lain, terbuka dalam transaksi dan menjalankan tugasnya secara optimal, serta menjaga integritasnya sehingga mampu menghindari berbagai praktek penipuan dan kecurangan;
3. Fathanah (cerdas dan bijaksana). Artinya, seorang pengusaha Muslim harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdikan, kebijaksanaan, serta memahami dan mengerti cara mengelola bisnis secara benar. Selain itu, mampu mengoptimalkan potensi kecerdasannya dalam mengelola bisnis yang kreatif, cerdas dan bijak dalam menghadapi situasi persaingan yang ketat dan mampu menciptakan bisnis masa depan yang lebih baik; dan

4. Tabligh (komunikatif). Artinya, pengusaha Muslim harus memiliki kemampuan komunikasi yang hebat, menyampaikan dengan bahasa yang benar dan berbobot, dengan tutur kata yang teratur, argumentatif, dan tepat (bil hikmah). Selain itu, juga mampu membangun komunikasi bisnis dan networking secara baik.

Selain itu, pengusaha Muslim juga hendaknya mampu memaksimalkan perannya dalam mengembangkan bisnis dan membantu pengusaha lain dalam memajukan bisnis, dengan memperhatikan pilar-pilar etika usaha seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keadilan sebagai pilar usaha dimaksudkan sebagai aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, excessive hoardings/unproductive, spekulatif, dan kesewenang-wenangan. Sementara keseimbangan dimaksudkan sebagai adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan risk-return, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual-material dan azas manfaat kelestarian lingkungan. Sedangkan kemaslahatan dimaksudkan sebagai orientasi pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.

Untuk itu, peran pengusaha Muslim dalam membangun ekonomi yang berbasis syariah, tidak hanya sekedar membangun jaringan di antara sesama pengusaha Muslim saja, tetapi juga mampu membangun jaringan secara lebih luas dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) fairness, yakni prinsip bisnis dan usaha yang didasarkan atas keadilan, baik dalam bentuk transaksi, akad maupun dalam praktek perdagangan; (2) transparency, yakni prinsip yang didasarkan atas perwujudan dalam keterbukaan (disclosure) perusahaan dalam

mempublikasikan kinerjanya secara teratur dan tepat waktu, dimana transparansi ini dilakukan terhadap semua stakeholders dalam batas-batas yang dapat dipublikasikan; (3) responsibility, yakni prinsip yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, baik pada stakeholders dan pemegang saham (manusia), maupun tanggung jawab transendental (ilahiyyah); dan (4) morality, yakni prinsip yang didasarkan atas kejujuran, kepekaan sosial, dan tanggung jawab individu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengusaha Muslim hendaknya mampu membangun dan menjalankan bisnisnya di atas landasan syariah yang benar untuk mendapatkan ridha Allah dan berlaku adil serta jujur terhadap pihak lainnya dalam menjalankan bisnisnya. Pengusaha Muslim harus senantiasa membebaskan dirinya dari praktek-praktek bisnis yang terlarang dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa praktek terlarang yang harus dihindari oleh pengusaha Muslim, yakni: gharar (spekulasi), maisir (judi), riba (bunga uang), dhulm (menganiaya/merugikan pihak lain secara zhalim), risywah (menyuap/sogok), bisnis barang haram, dan menyisipkan kemaksiatan ketika negosiasi dalam menjalankan bisnis.

Revitalisasi entrepreneurship dalam membangun ekonomi umat harus terus dilakukan dan digerakkan oleh entrepreneur Muslim di Indonesia, baik secara perorangan maupun secara kelompok/organisasi atau dengan membentuk konsorsium pengusaha Muslim Indonesia. Tujuan revitalisasi ini adalah agar pengusaha Muslim secara bersinergi dengan ulama, tokoh-tokoh Muslim, dan pihak lainnya, saling memfasilitasi dalam mencerdaskan pemahaman etika dan prinsip bisnis yang sesuai dengan syariat Islam dan berupaya dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pengusaha

Muslim juga harus berperan aktif dalam membangun komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah atau lembaga lainnya dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha Islam.

C. PENUTUP

Revitalisasi entrepreneurship di kalangan pengusaha Muslim di Indonesia menjadi suatu keharusan dan hendaknya mendapatkan dukungan semua pihak sehingga umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas menjadi masyarakat yang sejahtera secara spiritual dan materil. Untuk mewujudkan dunia usaha umat Islam di Indonesia yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, maka harus mampu memberikan pemahaman dan pencerdasan pada masyarakat dalam menjalankan usaha bisnisnya yang dilandasi dengan etika dan prinsip bisnis berbasis syariah, seperti melandasi dengan sifat-sifat nubuwah yang disingkat dengan SAFT, yaitu Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.

Revitalisasi entrepreneurship di kalangan pengusaha Muslim juga harus dilandasi dengan menegakkan pilar-pilar ekonomi berbasis syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta berdiri kokoh di atas pondasi ekonomi syariah, yakni ukhuwah, syariah, akhlak dan akidah. Karenanya, harus dibangun pula prinsip-prinsip good corporate governance di atas keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jaab, moralitas dan kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sani al-Mishri. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Cet .I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sudibyo. 2013. *Pidato Sambutan PP Muhammadiyah dalam Munas ke-1 ISMI*, 26 April 2013. Jakarta:ISMI Press.
- Musyawah Nasional-I Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. 2013. *Hasil-Hasil Keputusan Munas ke-1 ISMI*. Jakarta: ISMI Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*. 2008. Cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryo B. Sulisto. 2013. *Peran Pengusaha Muslim dalam Memperkuat Pembangunan Nasional*, disampaikan pada Munas ke-1 ISMI, 26 April 2013. Jakarta: ISMI Press.

MODEL KOLABORATIF BIMBINGAN KARIR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH DALAM MENINGKATKAN SOFTSKILL, BAHASA, KARAKTER DAN PENAMPILAN DIRI MAHASISWA

Syamsuddin

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Email: *syamsuddin @unimal.ac.id*

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan tracer study yang dilakukan oleh Central Development Center (CDC) tahun 2018. Berdasarkan tracer study tersebut menunjukkan bahwa kekurangan alumni yang memperoleh pekerjaan artinya kurangnya pengguna/user memakai alumni Unimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan diperlukan kompetisi global yang membutuhkan mental dan skill yang memiliki keunggulan untuk mahasiswa agar mampu bersaing. Strategi mempersiapkan skill melalui pengelolaan perilaku yang baik, menaikkan kompetensi diri dan memiliki semangat literasi melalui dengan jalur pendidikan dan konsep diri melalui pengalaman bekerjasama lintas generasi/lintas disiplin ilmu. Tujuan penelitian ini adalah terbentuknya model bimbingan karir kolaboratif untuk memantapkan kematangan karir mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan. Penelitian ini menghasilkan : (1) Gambaran Kematangan Karir mahasiswa Unimal setelah diberikan bimbingan karir kolaboratif, berada pada kategori matang; (2) Efektivitas bimbingan karir kolaboatif untuk memantapkan kematangan karir mahasiswa, (3) Model bimbingan karir kolaboatif untuk memantapkan kematangan karir mahasiswa. Kesimpulan penelitian adalah kematangan karir mahasiswa berada pada kategori matang, berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan model layanan bimbingan karir kolaboratif untuk memantapkan kematangan karir mahasiswa.

Kata Kunci: *revitalization, entrepreneurship, people's economy.*

A. PENDAHULUAN

Tatana Universitas Malikussaleh merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di propinsi Aceh. Perguruan ini telah menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan mampu meluluskan mahasiswa rata-rata 4,7 tahun. Dengan tingkat rata-rata kelulusan yang demikian sehingga masa tunggu kelulusan tersebut sudah memnuhi standar yang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44

Tahun 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengacu kepada regulasi tersebut menunjukkan bahwa Universitas Malikussaleh telah mampu menjalankan tugasnya sebagai agent of change dalam dunia pendidikan. Tentunya, dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa tentunya Universitas Malikussaleh telah melakukan dengan sistematis baik di dalam kelas, memberikan bimbingan baik melalui seminar maupun sosialisasi, serta melakukan kuliah dilapangan berupa Kuliah Kerja Nyata. Dengan demikian, Universitas Malikussaleh dapat berfungsi sebagai tempat untuk mempersiapkan mahasiswa yang berpotensi atau profesional terhadap background ilmu pengetahuannya. Sehingga mereka telah memiliki bekal untuk bersaing dalam dunia kerja sehingga mempertemukan dengan pengguna atau user. Dalam mempersiapkan mahasiswa dapat digunakan oleh user, Universitas Malikussaleh mendirikan Central Development Career (CDC) yang berperan sebagai tempat bimbingan mahasiswa dan alumni untuk mendapat pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, setelah mempersiapkan mahasiswa dan alumni memiliki kompetensi yang baik terhadap konsentrasi keilmuan mereka, namun fenomena menunjukkan bahwa pengguna alumni yang masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil tracer studi tahun 2018 yang dilaksanakan Career Development Center (CDC). Berdasarkan hasil tracer study yang telah dilakukan oleh Central Development Center tersebut menunjukkan kekurangan alumni yang memperoleh pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut memberikan pesan kepada kita bahwa kompetisi global membutuhkan mental dan skill yang memiliki keunggulan agar mampu bersaing (competitive advantage). Strategi mempersiapkan skill yang paling mudah melalui pengelolaan perilaku yang baik (behavioral attitude), menaikan kompetensi diri dan memiliki semangat literasi. Bekal persiapan diri

tersebut dapat dilalui dengan jalur pendidikan (long life education) dan konsep diri melalui pengalaman bekerjasama lintas generasi/lintas disiplin ilmu (experience is the best teacher). Penguatan sumber daya manusia UNIMAL perlu dilakukan agar lulusan lebih siap secara akademik, pengetahuan, ketrampilan, performance, karakter dan profesionalisme menghadapi era industri 4.0. Dengan demikian, mewujudkan hal tersebut, Universitas Malikussaleh mendirikan UPT. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan (UPT.BK dengan Keputusan Rektor Nomor : 583/UN45/KP/2019 merupakan penggabungan Pusat Bimbingan dan Konseling dengan Career Development Center (CDC). Dengan mendirikan pusat bimbingan karir tersebut maka masalah kekurangan alumni yang harus diperbaiki meliputi Softskill, Bahasa, Karakter dan Penampilan diri.

Dalam upaya memberikan bimbingan karir melalui Pusat Bimbingan Karir dan Kewirausahaan kepada mahasiswa yang meliputi softskill, bahasa dan karakter penampilan diri yaitu melalui beberapa pendekatan ataupun melibatkan peran Badan Usaha Milik Negara dan peran Alumni. Dengan demikian, dalam mengkolaborasi peran UPT, BUMN, serta alumni maka penelitian ini merumuskan Model Kolaboratif Bimbingan Karir Universitas Malikussaleh dalam Meningkatkan softskill, bahasa, karakter dan penampilan diri Mahasiswa. Melalui Model bimbingan kolaboratif ini mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan kematangan karir mereka meliputi softskill, bahasa, dan karakter dan penampilan diri. Adapun sebagai rumusan dari Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kecenderungan dibutuhkannya layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi oleh mahasiswa untuk memantapkan kematangan karirnya di masa depan, tetapi layanan yang telah dilakukan belum diterima alumni oleh pengguna atau user.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Gambaran peningkatan softskill, bahasa, serta karakter dan penampilan diri mahasiswai (2); (2) Efektivitas bimbingan karir kolaboatif untuk peningkatan softskill, bahasa, serta karakter dan penampilan diri mahasiswa, (3) Model bimbingan karir kolaboatif untuk meningkatkan karir mahasiswa.

B. PEMBAHASAN

Dalam hal bimbingan karir dan konseling adanya bimbingan karir. Berikut dapat dilihat pengertian bimbingan karir menurut para ahli. Menurut Winkel (2005:114) bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam menghadapi lapangan kerja atau jabatan/profesi tertentu serta membekali diri supaya siap maemangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari pogram pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir merupakan suatu proses bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar dapat mmengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Lebih lanjut, kolaboratif merupakan bentuk kerjasama dan interaksi beberapa elemen maupun individu terkait. Sebagaimana dalam kamus Heritage Amereka (2000), kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha pengembangan pemikiran. Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta

menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa kolaborasi adalah bentuk bekerjasama dalam menggabungkan pemikiran secara berkesinambungan yang meliputi pertukaran pandangan ide atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator.

Penelitian yang dilakukan Brabeck, Walsh & Latta (Dollarhide & Saginak, 2012:163) menunjukkan bahwa dengan adanya kolaborasi antar kelompok (seperti sekolah, universitas, masyarakat dan instansi terkait) dapat memberikan dampak yang positif terhadap motivasi akademik dan pengalaman mahasiswa. Kesuksesan mahasiswa dalam pengambilan keputusan karirnya tidak terlepas dari peran dosen, masyarakat maupun instansi. Penelitian yang dilakukan oleh Bryan (Young, 2013:2) memberikan makna bahwa proses kolaborasi yang dilakukan oleh konselor dengan berbagai pihak lain (instansi terkait, alumni) memberikan dampak pada tingginya motivasi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kolaborasi dengan berbagai pihak (termasuk dengan orang tua) penting dilakukan oleh dosen melalui UPT agar tercapainya tujuan pelayanan bimbingan dan konseling menuju perkembangan mahasiswa yang mandiri dan optimal dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, dalam penelitian penelitian kolaboratif dapat meningkatkan softskill, bahasa, karakter dan penampilan diri. Adapun dalam artikel Fatimah Khoiraton Hisaan (2018) **mengatakan bahwa** *Soft skill* adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi, berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang menjadi ciri kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan oranglain. Soft skill menyangkut tentang kepribadian seseorang yang dapat meningkatkan interaksi

antar individu, kinerja pekerjaan dan prospek dalam berkarir. Soft Skill juga dapat diartikan keterampilan yang tidak dapat dinilai dan dilihat secara langsung. contoh soft skills yaitu (1). Komunikasi, ; (2) Team work (Kerja Tim),; (3) Manajemen waktu, (4) Manajemen diri,; (5) Berfikir kritis,; (6) Profesionalisme. Berkaitan dengan hal tersebut berikut dapat digambarkan dibeberapa contoh softskill. Berkaitan softskill komunikasi, dimana cara berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Jika tidak ada kemampuan dalam berkomunikasi. Dengan komunikasi yang baik dan benar akan diketahui apa yang anda inginkan, apa yang konsumen anda butuhkan, apa yang perusahaan anda inginkan. Dan pemasaran produk anda pun akan semakin mudah. Selanjutnya, **manajemen diri** berbekal soft skill manajemen diri ini akan membawa seseorang untuk mengendalikan emosi diri. Seorang harus mengenali dan mengendalikan emosinya. Sebagai contoh cara memotivasi diri agar terus semangat menjalani bisnis. Bagaimana ketika perusahaan mengalami penurunan dan harus segera mengambil keputusan. Soft skill manajemen diri ini sangat penting dimiliki. **Team Work merupakan tim kerja dimana peran satu dengan peran yang lainnya saling melengkapi.** Soft skill kerja tim ini akan melatih diri untuk terbiasa bekerjasama, tidak membebani suatu pekerjaan pada diri sendiri atau satu orang saja. Bagaimana agar setiap orang memiliki beban atau tugas yang sebanding dengan kemampuannya masing – masing untuk mencapai tujuan yang sama.

Dengan demikian, kegiatan kolaboratif yang melibatkan peran Badan Usaha Milik Negara serta Peran Alumni Dengan latar belakang Nawa Cita Presiden, Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komitment Forum Human Capital Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang melahirkan Program yang dapat memberikan Pengayaan wawasan dan keterampilan untuk mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul terutama dalam menghadapi persaingan global yaitu Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. Harapan kedepannya adalah link & match kurikulum pendidikan di Universitas khususnya Universitas Malikussaleh dapat selaras dengan kebutuhan kompetensi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya keterlibatan masyarakat (alumni) dapat memberikan dampak yang positif terhadap motivasi akademik dan pengalaman mereka kepada mahasiswa. Keterlibatan alumni dalam bimbingan karir ini disebabkan Universitas Malikussaleh memiliki alumni pada birokrasi, pengusaha, serta pegiat sosial. Keterlibatan alumni dalam model kolaboratif ini adalah melalui seminar yang melibatkan mereka sebagai pemateri sehingga dengan keadaan tersebut mereka dapat berperan secara langsung menumbuhkan potensi diri mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh Universitas Malikussaleh dalam menumbuhkan kematangan karir mahasiswa mengkolaborasikan peran Unit Bimbingan Karir dan Kewusahaan, Badan Usaha Milik Negara serta peran Alumni. Melalui kolaboratif ini mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan kematangan karir mereka meliputi softskill, bahasa, serta karakter dan penampilan diri.

Upaya Universitas Malikussaleh melalui UPT. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan memperbaiki softskill, bahasa, serta karakter dan penampilan diri mahasiswa adalah memberikan sosialisasi, seminar. Melalui upaya ini UPT berkolaborasi dengan para alumni, diantaranya adalah melalui UPT Bimbingan Karir Universitas Malikussaleh Berikan Motivasi Bagi mahasiswa oleh Motivator

Lailan F Saidina pada seminar Motivasi di aula Cut Meutia Unimal 06 Oktober 2019. Seminar mahasiswa ini diikuti lebih dari 150 orang mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi yang ada di Unimal. Motivator yang didatangkan untuk kegiatan ini berasal dari Tandaseru Consulting yakni Lailan F Saidina yang juga merupakan alumni Unimal.

Dalam salah satu sesi materinya Lailan memotivasi peserta untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri sehingga bisa memiliki ide dan menciptakan hal-hal inovasi sehingga bisa beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0.

Selanjutnya, upaya melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara adalah melalui Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) mahasiswa Universitas Malikussaleh mengikuti program ini dan saat ini sedang magang di beberapa BUMN, seperti PT PIM dan PTPN. Program yang difasilitasi ini merupakan kerjasama antara Kementerian BUMN dan Kemenristekdikti yang ditawarkan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti program ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan (BKK) Universitas Malikussaleh, Dr Sulaiman ketika membuka Seminar Motivasi, Sabtu (5/10) di Aula Cut Meutia Kampus Unimal Bukit Indah. Sulaiman juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020 akan ada 20000 posisi yang disediakan bagi mahasiswa untuk mengikuti magang pada BUMN yang ada di Indonesia. Untuk mempersiapkan mahasiswa Unimal agar mempunyai prestasi dan mampu bersaing dengan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lainnya, UPT BKK Unimal melaksanakan Seminar Motivasi yang bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar dan berkarya inovatif.

Dalam memperbaiki bimbingan karir untuk mahasiswa Unimal berupaya tingkatkan jumlah mahasiswa magang bersertifikat, UPT Bimbingan Karir Undang Ormawa, Unit Pelaksana Teknis Bimbingan Karir dan Kewirausahaan (UPT BKK) Universitas Malikussaleh mengundang organisasi mahasiswa (ormawa) di lingkungan Unimal untuk melakukan sosialisasi Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB). Pertemuan bertajuk Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Aula Meurah Silue Kampus Lancang Garam Lhokseumawe, Rabu (18/9). Tujuan dilaksanakannya Rakor ini adalah untuk menyampaikan kepada ormawa tentang sudah adanya Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB) di Unimal, ujar Dr Sulaiman yang merupakan Kepala UPT BKK Unimal. UPT BKK ini sebagai *Person in Charge* (PIC) program mahasiswa bersertifikat BUMN di Universitas Malikussaleh. Dalam setahun dilaksanakan sebanyak 2 periode (*batch*) yaitu *batch* pertama pada bulan januari sampai Juni dan *batch* kedua pada bulan Juli sampai Desember. Mahasiswa yang dianggap memenuhi syarat nantinya akan diberikan pembekalan dalam bentuk pelatihan yang meliputi soft skill dan budaya kerja di BUMN agar mampu bersaing dengan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain di Indonesia.

Upaya bimbingan karir terhadap mahasiswa melalui pelatihan sebelum terjun dalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat . Dalam pogram ini mahasiswa di magang di sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara untuk mendapatkan pengetahuan baru, memperluas jaringan, dan membuka kesempatan karier. Melalui pogram ini mahasiswa memiliki keterampilan yang kompeten, sebab di saat sama, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia juga mendapatkan kesempatan sama. Untuk mendapatkan kompetensi untuk lebih bisa

diandalkan unggul dalam persaingan. Pelatihan pada program ini mengundang pemateri dari BUMN seperti PT Pupuk Iskandar Muda dan Perusahaan Listrik Negara. Pihak Bina Karier dan Kewirausahaan juga mengundang profesional baik dari kalangan swasta maupun dari perguruan tinggi yang memiliki pengalaman profesional dalam bidangnya. Narasumber menyampaikan materi berbeda seperti kepemimpinan, manajemen konflik dalam perusahaan, budaya dan etika profesi, dan sebagainya. Narasumber dari PLN adalah Alibasyah Ibrahim yang merupakan pegawai teladan PLN Aceh. Dari PT PIM ada Edi Haryadi Hasan MSM yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Kapusdiklat). Sedangkan Azhari A Gani ST, Vice President Vinca Rosea yang juga alumni Unimal. Dalam pelatihan tersebut, para mahasiswa menggambarkan kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta impian yang akan mereka wujudkan dalam lima tahun mendatang. Mereka juga menggambarkan tokoh serta buku yang telah menginspirasi mereka selama ini. Dari penggambaran tersebut, terlihat mahasiswa memiliki visi yang tepat untuk membangun karier di masa mendatang. mahasiswa langsung menggambarkan dengan detail perusahaan BUMN tempatnya berkarier serta penghasilan yang diharapkan akan ia dapatkan. menggambarkan target nilai kesejahteraan yang akan diperoleh lima tahun mendatang.

Baerdasarkan beberapa pandangan dari beberapa nara sumber dari bimbingan tersebut telah menunjukkan prestasi yang gemilang untuk mahasiswa. Sebagaimana dikatakan oleh kepala UPT. Bimbingan karir dan kewirausahaan Universitas Malikussaleh bahwa sebagai prestasi awal dari bimbingan tersebut mahasiswa dapat menumbuhkan potensi diri dengan satu tekad yaitu kita sama tidak ada beda. Selanjutnya mereka juga telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan

oleh Badan Usaha Milik Negara, sehingga mereka lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan. Sulaiman menambahkan berkat model kolaborasi ini menunjukkan optimisme yang besar dari mahasiswa karena mereka memiliki yang sangat baik, sehingga melalui prestasi yang gemilang ini beberapa diantara mahasiswa yang mengikuti bimbingan ditarik langsung oleh narasumber atau user dipekerjakan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana user bekerja. Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan softskill, bahasa, karakter dan penempilan diri telah membawa peningkatan bagi mahasiswa. Selanjutnya, berkaitan dengan efektivitas bimbingan yang berlangsung pada bimbingan kolaborasi tersebut sangat efektif dan juga model bimbingan kolaboratif ini dapat meningkatkan karir mahasiswa.

C. PENUTUP

Bimbingan karir merupakan usaha mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Adapun dalam meghadapi hal tersebut dapat mengkolaborasikan bimbingan karir. Kolaborasi dapat dilakukan seperti sekolah, universitas, masyarakat dan instansi terkait dapat memberikan dampak yang positif terhadap motivasi akademik dan pengalaman mahasiswa khususnya mahasiswa universitas Malikussale. Kolaborasi bimbingan ini merupakan proses berpikir antara pihak terlibat memandang aspek perbedaan dapat menemukan solusi. Dengan kondisi tersebut dapat menggabungkan ide-ide yang memberikan perspektif kepada kolaborator. Sebagai simpulan Kesimpulan hasil studi proses model bimbingan karir kolaboratif untuk memperbaiki softskill, bahasa, dan karaktet dan penampakan diri mahasiswa dipaparkan sebagai berikut. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah

diberikan bimbingan karir kolaboratif khususnya kepada mahasiswa magang mereka mendapatkan sertifikat dari BUMN, ada juga yang diterima pada instansi tersebut. (2) Secara keseluruhan bimbingan karir sudah efektif, dimana mahasiswa menunjukkan tingkat kematangan yang tinggi. Pada aspek sikap, indikator orientasi dan kompromi, menunjukkan kematangan yang tinggi. Secara kerelaan mahasiswa untuk menerima usulan/saran dari pihak lain. Hal ini dapat berarti bahwa penguasaan kompetensi pemecahan masalah sangatlah tinggi, mahasiswa sudah dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi dalam pekerjaannya. (3). Secara umum diperoleh bukti empirik bahwa model bimbingan karir efektif untuk untuk mengembangkan kematangan karir mahasiswa. Dengan kata lain hasil uji coba model menunjukkan bahwa ditinjau secara keseluruhan baik pada setiap aspek maupun indikator-indikatornya cenderung mengalami perubahan tingkat kematangan yang lebih berarti (signifikan) setelah menggunakan bimbingan karir. Model bimbingan karir kolaboratif ini, dapat memberikan kontribusi sebagai pendekatan yang efektif untuk mengembangkan kematangan karir mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifqy Ash Shiddiqy, 2017 *Model Bimbingan Karir Kolaboratif Untuk Meningkatkan Kematangan Karir Mahasiswa*. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.ed
- Fathimah Khoirotun Hisaan (2018) *Pentingnya Soft Skill dalam Berbisnis*. Redaksi-Feature & Artikel, 27Juli 2018 oleh Redaksi.
- <http://rasa-stroberi.blogspot.com/2012/06/pengertian-bimbingan-karier-bk-sekolah.html>
- <http://aniendriani.blogspot.com/2011/03/tujuan-bimbingan-karir-dan-konseling.html>
- Unimal News| Lhokseumawe (06 Oktober 2019) Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) sudah memasuki batch II
- Unimal News|Lhokseumawe (18 September 2019) PMMB kepada Organisasi Mahasiswa (ormawa)
- Unimal Unews| Lhokseumawe – (13 April 2019) Sosialisasi dan Pelatihan kewirausahaan mahasiswa dalam Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia
- Winkel, W.S. (1997) *Bimbingan dan konseling di institusi pendidikan*. Jakarta: Grasindo